



**PENGEMBANGAN SISTEM *MONITORING* DAN EVALUASI
PERENCANAAN PROGRAM DI SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

Disusun Oleh :

YUDICO RAMBANG,SE

NIP. 19830331 200903 1 002

NDH : 044

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH (BPSDMD)
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS (PKP) ANGKATAN IV
TAHUN 2025**



LEMBAR PERSETUJUAN

LAPORAN IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN

PENGEMBANGAN SISTEM *MONITORING* DAN EVALUASI

PERENCANAAN PROGRAM DI SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Oleh:

YUDICO RAMBANG,SE

NIP. 19830331 200903 1 002

NDH. 044

Telah disetujui untuk diseminarkan pada Hari/ Tanggal : Selasa / 09 Desember 2025

Tempat : BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan

COACH,

MENTOR,

Dra.HARIYATI,SH,MM
NIP. 1967052319900320005

MUH IQBAL BASA, SE
NIP. 19810416 201001 1 012

Menyetujui :

a. n. Kepala BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan Kepala Bidang PK Manajerial,

TRI HARTATI, SE.M.Si
NIP. 19721219 200604 2 006



LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN

PENGEMBANGAN SISTEM *MONITORING* DAN EVALUASI PERENCANAAN PROGRAM DI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Oleh:

YUDICO RAMBANG,SE

NIP. 19830331 200903 1 002

NDH: 044

Telah diseminarkan dan disahkan pada: Hari/Tanggal :

Tempat : BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan

Mengesahkan :

COACH,

NARASUMBER/ PENGUJI,

Dra.HARIYATI,SH,MM
NIP. 1967052319900320005

TRI HARTATI, SE.M.Si
NIP. 19721219 200604 2 006

Menyetujui

Kepala BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan Kepala Bidang PK Manajerial,

Prof. Dr.H.M Edwar Juliarta,S.Sos, MM
Pembina Utama Madya/IV.d
NIP.197507071997031003



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan **Implementasi Aksi Perubahan “Pengembangan Sistem *Monitoring* dan *Evaluasi* Perencanaan dan Program di Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir”** dengan baik.

Penyusunan rancangan aksi perubahan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih terstruktur, transparan, serta berbasis teknologi informasi dalam mendukung efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten OKI. Harapannya, dokumen ini dapat menjadi pedoman awal dalam mewujudkan tata kelola kelembagaan yang lebih akuntabel, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan daerah.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada berbagai pihak yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan dalam penyusunan dokumen ini, antara lain:

1. Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai Lembaga Negara yang telah menjamin mutu terlaksananya Pelatihan Kepemimpinan Administrator Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024;
2. Bapak Prof. Dr. H. M. Edwar Juliarta, S.Sos. MM selaku Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Selatan beserta jajaran;
3. Ibu Tri Hartati, SE, M.Si selaku Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Selatan beserta jajaran;
4. Ibu Dra. Hariyati, SH, MM selaku *coach* yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan Laporan Hasil aksi perubahan;
5. Keluarga Tercinta (Istriku dan Kedua Anakku) yang telah memberi doa dan support selama menjalani proses Pelatihan Kepemimpinan Pengawas;
6. Bapak Muh Iqbal Basa, SE selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang telah bersedia menjadi mentor;
7. Tim Panitia PKP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yang telah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan;
8. Rekan-rekan peserta Diklat PKP Angkatan I, II dan III Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025;
9. Tim Efektif Aksi Perubahan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang telah bekerjasama sampai dengan selesainya aksi perubahan;
10. Semua pihak yang ikut membantu hingga tersusunnya rancangan aksi perubahan ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan rancangan aksi perubahan ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu kritik dan saran sangat diperlukan agar aksi perubahan menjadi lebih baik. Semoga rancangan aksi perubahan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak;

Palembang, 9 Desember 2025

YUDICO RAMBANG, SE
NIP. 19830331 200903 1 002
NDH : 044



DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan

Lembar Pengesahan

Kata Pengantar

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif

BAB I

1. Rencana Aksi Perubahan
 - a. Latar Belakang
 - Kondisi Saat ini
 - Kondisi yang diharapkan
 - b. Tujuan Aksi Perubahan
 - Jangka Panjang
 - Jangka Menengah
 - Jangka Pendek
 - c. Manfaat Aksi Perubahan
 - Bagi Organisasi
 - Bagi Masyarakat
 - d. Ruang Lingkup Aksi Perubahan
 - e. Analisis Masalah
2. Profil Kinerja Organisasi
3. Identifikasi Masalah
4. Faktor Penyebab Masalah
5. Dampak Masalah
6. Strategi Penyelesaian Masalah
 - a. Terobosan Inovasi
 - b. Milestone dan Kegiatan Aksi Perubahan

BAB II

Deskripsi Proses Kepemimpinan

- A. Membangun Integritas
- B. Pengelolaan TIM

BAB III

Deskripsi Hasil Kepemimpinan

- a. Capaian dan Bukti Perbaikan Kualitas Pelayanan Publik



BAB IV

Keberlanjutan Aksi Perubahan

BAB V

Keterkaitan Dengan Mata Pelatihan Pilihan

BAB VI

Kesimpulan Penutup



RINGKASAN EKSEKUTIF

PENGEMBANGAN SISTEM *MONITORING* DAN EVALUASI PERENCANAAN PROGRAM DI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Yudico Rambang, SE
Dra. Hariyati, SH, MM
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Sumatera Selatan

Email : yudicorambangyudico@gmail.com

Aksi perubahan ini disusun untuk menjawab tantangan dalam pengelolaan perencanaan dan program di Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), khususnya pada aspek monitoring dan evaluasi (Monev). Selama ini, kegiatan Monev masih dilakukan secara manual, tidak terintegrasi, serta belum berbasis indikator kinerja yang terukur. Kondisi tersebut berdampak pada lambatnya penyusunan laporan, lemahnya kualitas data, serta belum optimalnya fungsi pengawasan DPRD.

Melalui rancangan aksi perubahan ini, dikembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang terstruktur, terstandar, dan berbasis teknologi informasi. Metode yang digunakan meliputi analisis SWOT dan Fishbone untuk mengidentifikasi akar permasalahan, penyusunan SOP Monev, pengembangan aplikasi sederhana berbasis web/dashboard, serta pelatihan pegawai agar mampu mengoperasikan sistem.

Hasil yang diharapkan dari aksi perubahan ini adalah terwujudnya sistem Monev yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel, dengan indikator keberhasilan berupa tersusunnya SOP Monev, berjalannya aplikasi Monev sederhana, meningkatnya kompetensi pegawai, serta percepatan laporan kinerja minimal 30% dibandingkan metode manual. Aksi perubahan ini juga diharapkan berkelanjutan melalui penguatan kapasitas SDM, integrasi sistem dengan aplikasi pemerintah daerah, dan pembentukan budaya kerja yang lebih transparan dan berbasis data.

Kata Kunci: *Monitoring*, Evaluasi, Perencanaan, Program, DPRD, Kabupaten OKI



BAB I

RANCANGAN AKSI PERUBAHAN

I. Latar Belakang

Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menuntut setiap instansi pemerintah untuk memiliki sistem perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi program yang efektif, efisien, dan akuntabel. Sistem pemerintahan yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh seberapa baik suatu program dirancang dan dilaksanakan, tetapi juga oleh sejauh mana hasil pelaksanaannya dapat dipantau, diukur, dan dievaluasi secara obyektif dan berkelanjutan. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, peran monitoring dan evaluasi (monev) menjadi sangat penting sebagai alat pengendalian untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan capaian hasil pembangunan.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan perangkat daerah yang memiliki fungsi strategis dalam mendukung tugas dan wewenang DPRD. Sekretariat DPRD berperan sebagai fasilitator administratif dan operasional, sekaligus menjadi jembatan antara lembaga legislatif dan masyarakat dalam pelaksanaan fungsi representasi, legislasi, dan pengawasan. Oleh karena itu, pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat DPRD harus dikelola secara efektif, transparan, dan terukur agar dapat memberikan dukungan maksimal terhadap kinerja DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang demokratis dan berintegritas.

Namun, upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik tidak dapat dilepaskan dari pentingnya sistem monitoring dan evaluasi yang andal. Monitoring berfungsi untuk menilai sejauh mana pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan rencana, sedangkan evaluasi digunakan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi program serta memberikan umpan balik bagi perbaikan kebijakan di masa mendatang. Dalam praktiknya, kedua fungsi ini sering kali belum berjalan optimal di banyak instansi pemerintah daerah, termasuk di lingkungan Sekretariat DPRD.

Pelaksanaan sistem perencanaan, pengendalian, serta monitoring dan evaluasi pembangunan daerah memiliki dasar hukum yang kuat. Landasan utama adalah **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**, yang mengamanatkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan prinsip otonomi daerah dan tugas pembantuan, dengan tetap berpedoman pada prinsip akuntabilitas dan efisiensi.



Selanjutnya, **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah** menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Pelaksanaan moneyv merupakan salah satu bentuk konkret dari prinsip akuntabilitas dan transparansi tersebut.

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 juga memberikan pedoman teknis mengenai tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, serta tata cara pelaporan dan review rencana pembangunan daerah. Regulasi ini menjadi acuan penting dalam penyusunan mekanisme moneyv yang sistematis dan berkelanjutan. Selain itu, **PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)** menegaskan bahwa setiap instansi pemerintah wajib melaksanakan pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja sebagai bagian dari manajemen kinerja berbasis hasil (*result-based management*).

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 45 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir, Peraturan ini menggantikan **Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016** tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir. Setiap lembaga pemerintahan, terutama yang menyangkut fungsi legislatif seperti DPRD, memerlukan dukungan administratif dan teknis agar kinerjanya berjalan efektif. Sekretariat DPRD adalah salah satu institusi pendukung dalam sistem pemerintahan daerah yang memiliki peran penting untuk menyediakan pelayanan administratif, memfasilitasi tugas DPRD, dan menjembatani hubungan antara DPRD dengan lembaga eksekutif maupun masyarakat. Untuk itu diperlukan peraturan yang mengatur **organisasi** (struktur) dan **tata kerja** (prosedur, hubungan kerja, fungsi unit) dari Sekretariat DPRD agar pelaksanaan tugas bisa lebih efisien, jelas, dan akuntabel. Peraturan Bupati OKI Nomor 45 Tahun 2021 merupakan upaya pembaruan regulasi untuk menyempurnakan organisasi dan tata kerja Sekretariat DPRD di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Selain itu, **PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)** menegaskan bahwa setiap instansi pemerintah wajib melaksanakan pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja sebagai bagian dari manajemen kinerja berbasis hasil (*result-based management*).



Dengan demikian, pengembangan sistem monitoring dan evaluasi bukan hanya kebutuhan administratif, tetapi merupakan amanat regulatif dan moral dari berbagai peraturan perundangan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi hasil.

Saat ini, pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan program di Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir masih menghadapi berbagai kendala. Proses monev masih dilakukan **secara manual** menggunakan dokumen cetak dan file terpisah. Setiap bagian menyusun laporan kemajuan kegiatan secara mandiri tanpa sistem informasi yang terintegrasi. Akibatnya, data yang dihasilkan sering kali tidak sinkron antarbagian dan memerlukan waktu lama untuk direkap atau diverifikasi.

Selain itu, laporan hasil evaluasi sering terlambat disampaikan karena pengumpulan data dilakukan menjelang akhir tahun anggaran. Hal ini berdampak pada rendahnya kemampuan lembaga dalam melakukan *real-time monitoring* terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Pimpinan sulit memperoleh gambaran cepat dan akurat mengenai progres kegiatan, capaian kinerja, serta hambatan yang terjadi di lapangan.

Kondisi ini menyebabkan efektivitas proses pengambilan keputusan menjadi terbatas, karena informasi yang tersedia tidak selalu mutakhir dan belum tersaji dalam format yang mudah dianalisis. Akibatnya, peluang untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian strategi pelaksanaan program secara cepat menjadi terhambat. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menurunkan akuntabilitas dan kualitas penyelenggaraan layanan administrasi DPRD.

Kondisi yang diharapkan adalah terbangunnya **sistem monitoring dan evaluasi perencanaan program yang terintegrasi dan berbasis digital** di Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sistem ini diharapkan mampu mengintegrasikan seluruh data program, kegiatan, dan capaian kinerja ke dalam satu platform yang dapat diakses oleh seluruh bagian. Dengan sistem tersebut, proses monev akan berlangsung secara lebih cepat, transparan, dan akurat.

Sistem ini juga diharapkan mampu menyediakan *dashboard* interaktif yang menampilkan data capaian indikator kinerja, progres realisasi anggaran, serta analisis terhadap hambatan pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, pimpinan dan staf dapat bersama-sama melakukan pengawasan dan pengambilan keputusan secara berbasis data.



Selain peningkatan efisiensi dan akurasi, penerapan sistem ini akan menumbuhkan budaya kerja berbasis hasil dan akuntabilitas publik. Setiap bagian akan lebih bertanggung jawab terhadap capaian programnya, karena seluruh data kinerja dapat dipantau secara terbuka oleh pimpinan. Dalam jangka panjang, sistem ini juga akan mendukung peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh serta memperkuat posisi Sekretariat DPRD sebagai lembaga pelayanan publik yang modern, transparan, dan terpercaya.

Arah pembangunan nasional saat ini mengacu pada visi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yaitu **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**. Visi ini dijabarkan ke dalam delapan misi strategis yang dikenal dengan sebutan **Asta Cita**. Salah satu misi yang paling relevan dengan aksi perubahan ini adalah **misi ke-7**, yaitu *memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi*.

Melalui misi tersebut, pemerintah menekankan pentingnya birokrasi yang profesional, transparan, dan berorientasi hasil. Salah satu wujud nyata implementasi misi ini di tingkat daerah adalah pengembangan sistem monitoring dan evaluasi perencanaan program yang efektif. Sistem ini merupakan bagian integral dari upaya reformasi birokrasi, karena mampu memperkuat tata kelola lembaga, mempercepat alur pelaporan, serta meningkatkan transparansi publik.

Selain itu, pengembangan sistem monev berbasis digital juga mendukung pencapaian misi lain dalam Asta Cita, yaitu **pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan**. Dengan sistem yang efisien, penggunaan anggaran menjadi lebih terkontrol, sehingga setiap program benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sebagai bagian dari upaya transformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir, inovasi yang diusulkan dalam aksi perubahan ini adalah **pengembangan sistem monitoring dan evaluasi perencanaan program berbasis digital**. Sistem ini akan berfungsi sebagai platform terpadu untuk mencatat, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan seluruh program dan kegiatan secara berkala.

Sistem ini akan memuat fitur-fitur utama seperti input data kegiatan, pelaporan otomatis, *dashboard* capaian kinerja, serta analisis perbandingan antara target dan realisasi. Melalui fitur-fitur tersebut, pimpinan dapat memantau progres pelaksanaan program secara real-time dan mengambil langkah cepat untuk mengatasi hambatan yang muncul di lapangan.



Inovasi ini bukan sekadar transformasi teknologi, melainkan perubahan paradigma kerja menuju budaya kinerja berbasis data dan hasil. Dengan penerapan sistem monitoring dan evaluasi yang modern, Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir akan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta mendukung tercapainya misi reformasi birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam *Asta Cita* pemerintahan Presiden Prabowo–Gibran.

II. Tujuan

Aksi perubahan ini memiliki tujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan perencanaan program di Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir yang lebih terukur, transparan, dan efisien melalui penerapan sistem monitoring dan evaluasi yang terintegrasi. Tujuan tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efisien, dan berorientasi hasil, sejalan dengan arah kebijakan nasional dan *Asta Cita* Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka, khususnya dalam butir “Memperkuat sistem pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien” serta “Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis digital.”

Tujuan ini dijabarkan menjadi tiga tahapan waktu sebagai berikut:

1. Tujuan Jangka Pendek (selama pelaksanaan aksi perubahan)

Fokus jangka pendek diarahkan pada kegiatan nyata yang dilakukan dalam kurun waktu pelaksanaan Diklat PKP, antara lain:

- Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan mentor serta stakeholder terkait dalam rangka penyusunan rencana aksi.
- Membentuk tim efektif melalui penerbitan Surat Keputusan (SK) Kepala Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan aksi perubahan.
- Melaksanakan rapat tim efektif dan koordinasi lintas bagian guna menyamakan persepsi dan menetapkan tahapan pelaksanaan.
- Menyusun dan mengembangkan prototipe sistem monitoring dan evaluasi perencanaan program, baik dalam bentuk digital sederhana maupun format laporan terstruktur.
- Melaksanakan sosialisasi, pelatihan, atau uji coba sistem kepada pegawai yang terlibat dalam proses perencanaan dan pelaporan program.
- Melakukan evaluasi awal terhadap implementasi sistem melalui wawancara dan pengumpulan umpan balik dari pengguna sistem.



2. Tujuan Jangka Menengah

- Terlaksananya penggunaan sistem monitoring dan evaluasi secara rutin dan terintegrasi dalam seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan program di Sekretariat DPRD.
- Terwujudnya peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja antarbagian, serta tersedianya data kinerja yang cepat, akurat, dan mudah diakses sebagai bahan pengambilan keputusan pimpinan.

3. Tujuan Jangka Panjang

- Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, sesuai dengan prinsip reformasi birokrasi dan arah Asta Cita pemerintahan yang menekankan pada transformasi digital serta peningkatan pelayanan publik.
- Terbangunnya budaya kerja berbasis data (data-driven governance) di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai wujud peningkatan profesionalisme aparatur.

III. Manfaat

Pelaksanaan aksi perubahan ini diharapkan membawa manfaat yang nyata baik bagi organisasi, pegawai, maupun masyarakat. Manfaat tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat bagi Organisasi (Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir)

- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dengan tersedianya data capaian yang terukur dan terdokumentasi dengan baik.
- Menghemat penggunaan sumber daya, baik waktu maupun biaya operasional pelaporan, yang semula tersebar dan manual menjadi lebih terintegrasi.

2. Manfaat bagi Pegawai

- Mempermudah proses input dan pelaporan capaian kegiatan karena sistem bersifat otomatis dan terstruktur.
- Meningkatkan kompetensi pegawai dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di lingkungan kerja.
- Mengurangi beban administratif manual yang berulang, sehingga pegawai dapat lebih fokus pada substansi pelaksanaan kegiatan.

3. Manfaat bagi Pimpinan dan Stakeholder



- Menyediakan data real-time yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan strategis dengan lebih cepat dan tepat.
- Memperkuat fungsi pengawasan dan evaluasi oleh pimpinan DPRD maupun Sekretaris DPRD melalui pelaporan yang akurat dan mudah dipantau.
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik terhadap pelaksanaan program kerja Sekretariat DPRD.

4. Manfaat bagi Masyarakat dan Pemerintah Daerah

- Mendorong terciptanya pelayanan administrasi kedewanan yang lebih efektif, efisien, dan terbuka.
- Memberikan dampak positif terhadap persepsi publik terhadap kinerja lembaga DPRD dan Sekretariatnya, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

IV. Milestone Kegiatan Aksi Perubahan

Berikut tahapan (milestone) kegiatan aksi perubahan “Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Program di Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir”:

No	Kegiatan Utama	Waktu Pelaksanaan	Output yang Diharapkan
1	Konsultasi dengan Mentor	13 Oktober 2025	Mendapatkan arahan, masukan, dan validasi awal terhadap rancangan aksi perubahan.
2	Membuat SK Tim Efektif	15 Oktober 2025	Terbitnya Surat Keputusan Tim Efektif pelaksana aksi perubahan.
3	Rapat dengan Tim Efektif	23 Oktober 2025	Penetapan pembagian tugas, tanggung jawab, dan jadwal pelaksanaan kegiatan.
4	Koordinasi dengan <i>Stakeholder</i>	30 Oktober 2025	Dukungan dan komitmen dari stakeholder terkait, termasuk bagian perencanaan, keuangan, dan sekretariat alat kelengkapan DPRD.
5	Penyusunan dan Pengembangan Sistem	6 November 2025	Tersusunnya format, alur, atau prototipe sistem monitoring dan evaluasi perencanaan



No	Kegiatan Utama	Waktu Pelaksanaan	Output yang Diharapkan
	Monitoring dan Evaluasi		program.
6	Sosialisasi, Pelatihan, atau Uji Coba Sistem	10 November 2025	Pegawai memahami cara penggunaan sistem; diperoleh masukan untuk penyempurnaan.
7	Evaluasi Implementasi Aksi Perubahan	18 November 2025	Diperoleh umpan balik melalui wawancara, kuesioner, atau dukungan dari pengguna sistem untuk perbaikan lanjutan.

V. Sumber daya (Pemanfaatan IT)

Dalam pelaksanaan Aksi Perubahan, tentu dibutuhkan sumber daya yang dapat mendukung agar dapat terwujud secara optimal. Adapun sumber daya yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan aksi perubahan ini antara lain sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan dan sumber data/dokumen.

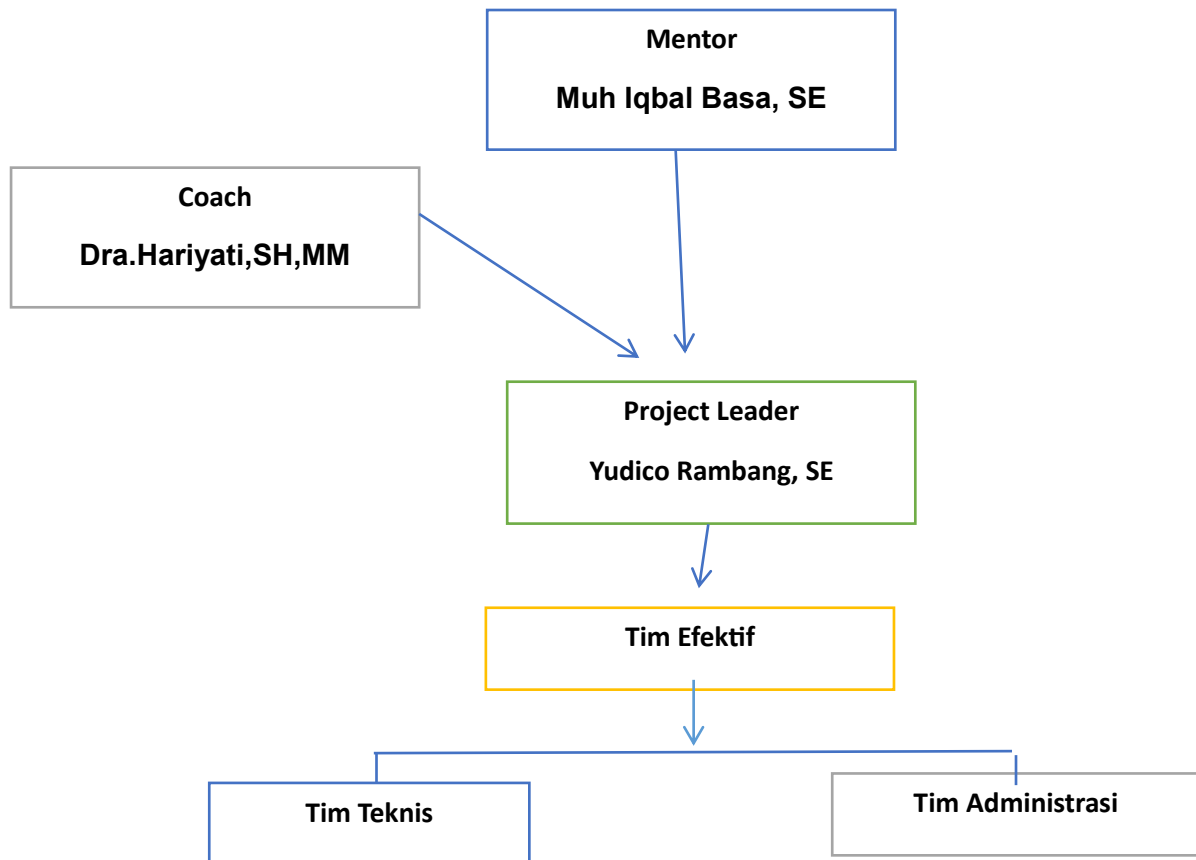
Penerapan aksi perubahan dan inovasi Pengembangan Sistem ini, tidak menggunakan sumber dana/biaya dari APBN, namun mendapat persetujuan dari Sekretaris DPRD Kabupaten OKI Bapak Muh Iqbal Basa, SE untuk mendukung pelaksanaan ini di tahun 2025, dan juga diperlukan jSDM yang mumpuni agar bisa terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.

VI. IDENTIFIKASI STAKEHOLDER

Adapun stakeholder yang terkait dengan laporan aksi perubahan dapat diklasifikasikan menjadi berbagai katogori ini adalah berbagai kategori ketergantungan pada tingkat keterlibatan, dampak atau pengaruh. Stakeholder dalam aksi perubahan ini adalah :

- Sekretaris DPRD Kabupaten OKI
- Kabag kabag Sekretariat DPRD Kabbupaten OKI
- Kasubag kasubag Sekretariat DPRD Kabupaten OKI
- Bappeda Kabupaten OKI
- Inspektorat Kabupaten OKI
- Tim Efektif

VII Pemetaan Stakeholder

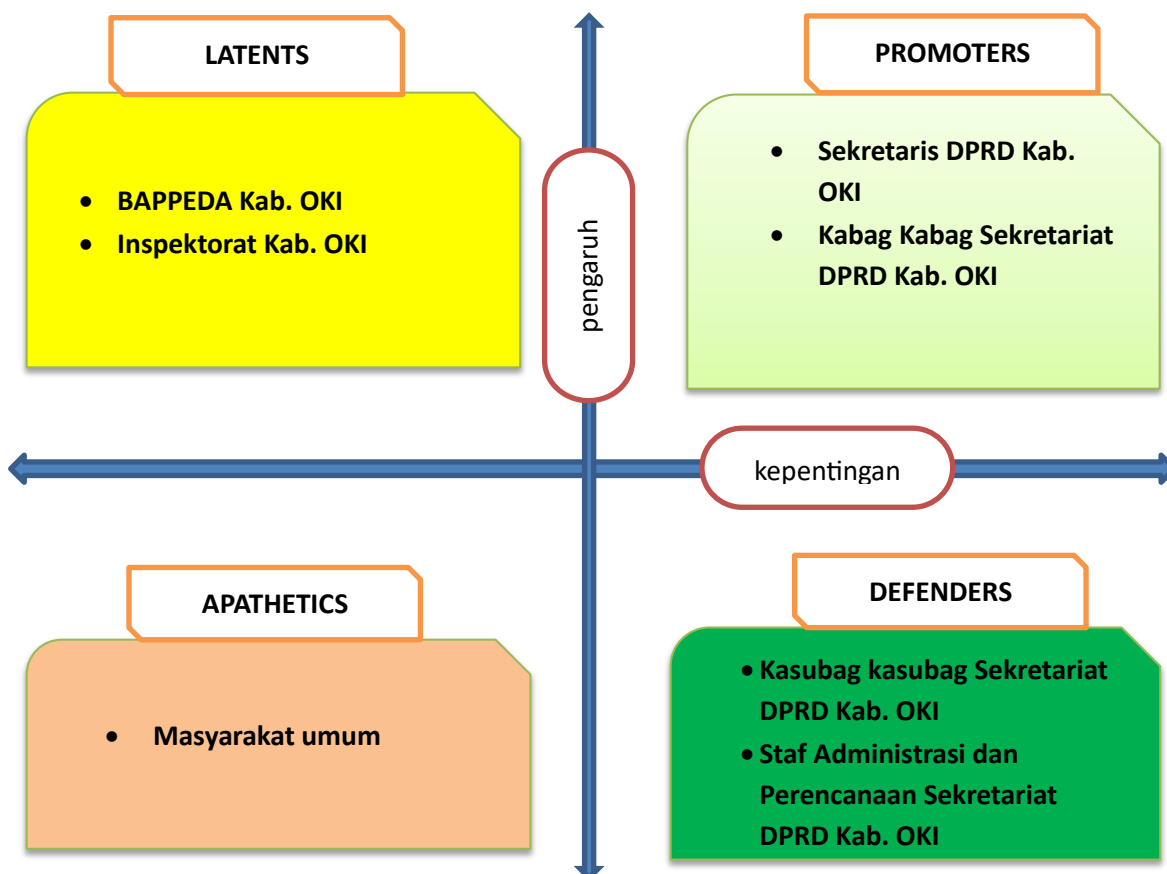


No	Posisi	Tanggung Jawab
1	Mentor	- Memberi dukungan kepada pelaksana rancangan aksi perubahan - Memberikan masukan / tanggapan terhadap rancangan aksi perubahan
2	<i>Project Leader</i>	- Membangun tim efektif - Melaksanakan rancangan aksi perubahan - Mengatur pembagian tugas dalam aksi perubahan
3	<i>Coach</i>	Sebagai pembimbing dalam memberikan masukan, arahan terkait aksi perubahan
4	Tim Efektif	Tim Efektif yang terdiri dari Tim Administrasi dan Tim Teknis
5	Tim Teknis	Tim yang bertugas terkait rencana kegiatan penyusunan dan pengembangan, implementasi, serta evaluasi terhadap peningkatan kualitas layanan pembuatan surat warga melalui penyediaan ruang konsultasi di kelurahan sirinagung kecamatan ilir barat satu kota palembang
6	Tim Administrasi	Tim yang mengurus surat menyurat dan administrasi rancangan aksi perubahan, serta mengumpulkan evidence / bukti

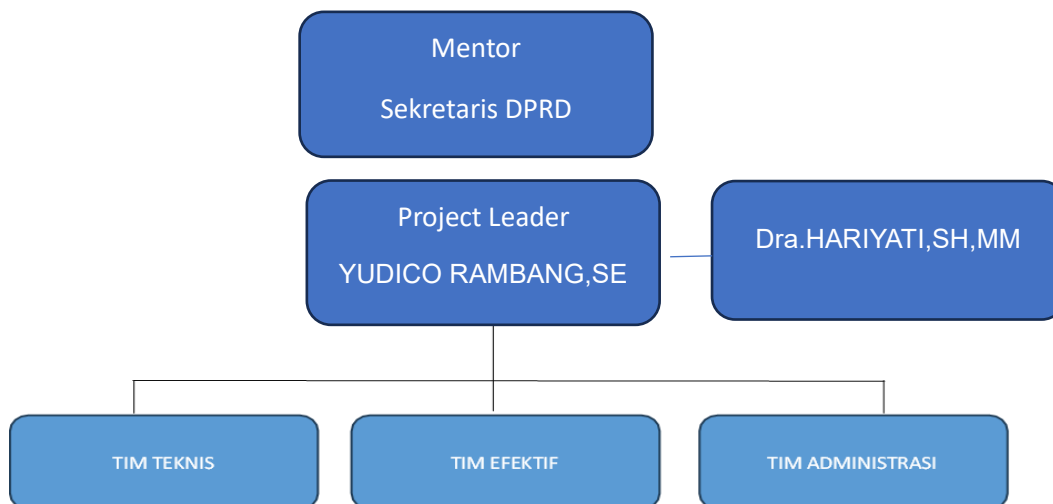
Masing-masing stakeholder ditempatkan dalam 4 (empat) kelompok berdasarkan analisis kuadran dengan mempertimbangkan ciri-cirinya sebagai berikut :

- a. **Promoters** : Memiliki kepentingan besar terhadap program dan juga kekuatan untuk membantu membuatnya berhasil (atau menggagalkannya).
- b. **Defenders** : Memiliki kepentingan pribadi dan dapat menyuarakan dukungannya dalam komunitas, tetapi kekuatannya kecil untuk mempengaruhi kegiatannya.
- c. **Latents** : Tidak memiliki kepentingan khusus maupun terlibat dalam kegiatan, tetapi memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi program jika mereka menjadi tertarik.
- d. **Apathetics** : kurang memiliki kepentingan maupun kekuatan, bahkan mungkin tidak mengetahui adanya kegiatan

Gambar Peta Stakeholder



1. Membangun Tim Efektif



No	Posisi	Tanggung Jawab
1.	Mentor	- Memberi dukungan kepada pelaksana rancangan aksi perubahan - Memberikan masukan / tanggapan terhadap rancangan aksi perubahan
2.	<i>Project Leader</i>	- Membangun tim efektif - Melaksanakan rancangan aksi perubahan - Mengatur pembagian tugas dalam aksi perubahan
3.	<i>Coach</i>	Sebagai pembimbing dalam memberikan masukan, arahan terkait aksi perubahan
4.	Tim Efektif	Tim Efektif yang terdiri dari Tim Administrasi dan Tim Teknis
5.	Tim Teknis	Tim yang bertugas terkait rencana kegiatan penyusunan dan pengembangan, implementasi, serta evaluasi terhadap peningkatan kualitas layanan administrasi melalui penyediaan ruang konsultasi di kelurahan Siringagung Kecamatan Ilir Barat Satu Kota Palembang
6.	Tim Administrasi	Tim yang mengurus surat menyurat dan administrasi rancangan aksi perubahan, serta mengumpulkan evidence / bukti



2. Hasil Pemetaan

Formulir Peserta

FORMULIR PESERTA

Nama : Yudico Rambang, SE
 NIP : 19830331 200903 1 002
 Jabatan : PIt. Perencana/Pereny. Rencana Kegiatan dan Anggaran
 Instansi : Sekretariat DPRD Kabupaten UKI
 Program : Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan IV Tahun 2025

Komponen	Sub Komponen	SKOR 1 - 10
INTEGRITAS	1. Mengingat rekan kerja atau bawahan untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi.	8
	2. Menunjukkan komitmen dan tanggung jawab terhadap penyelesaian tugas yang diembannya.	8
	3. Mengingat rekan kerja atau bawahan untuk melaksanakan tugas dan fungsi mereka sesuai dengan tenggat waktu yang ada dan mematuhi ketentuan terkait waktu kerja yang berlaku dalam organisasi.	8
	4. Memberikan informasi yang dapat dipercaya kepada orang lain/ pihak lain sesuai dengan etika organisasi.	8
	5. Menerapkan norma atau aturan yang berlaku dalam organisasi secara konsisten dalam setiap situasi dalam lingkup pekerjaannya.	8
	6. Memberikan argumen dengan disertai pemahaman atas ketentuan yang berlaku di organisasi dan konsekuensinya dalam mengingatkan atau mengajak rekan kerja/ bawahan dalam penegakan aturan.	8
Jumlah		5,00
KERJASAMA	7. Menyampaikan informasi dengan cukup jelas baik secara tertulis maupun lisan dalam menunjang kelancaran kerja pada unit/tim yang dipimpinnya.	8
	8. Melakukan koordinasi yang efektif dengan pihak-pihak relevan di lingkup satuan kerja/organisasi dalam rangka menjamin kinerja di lingkup unitnya.	8
	9. Aktif menjalin komunikasi dengan pemangku kepentingan eksternal organisasi dalam rangka menunjang kualitas layanan yang diselenggarakan organisasi.	7
	10. Merespon dengan positif adanya perbedaan atau kemajemukan dalam unit/tim kerja sehingga tetap fokus pada tujuan kerja yang disepakati.	8
	11. Bertanggungjawab terhadap peran atau tugasnya dalam rangka mencapai sasaran atau tujuan tim yang telah disepakati.	8
	Jumlah	7,60
MENGELOLA PERUBAHAN	12. Aktif mencari informasi kebutuhan pemangku kepentingan dan memberikan penjelasan mengenai prosedur standar pelayanan yang berlaku sebagai upaya pemenuhan pelayanan publik yang efektif dan efisien.	7
	13. Aktif mengembangkan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan dalam pemberian pelayanan publik.	8
	14. Menggunakan cara yang beragam untuk memastikan bawahan memahami arahan penyelesaian tugas yang sesuai dengan target kerja yang diberikan dan SOP yang berlaku.	8
	15. Mencari metode kerja alternatif yang lebih efektif untuk menyelesaikan pekerjaan terutama ketika menghadapi hambatan.	7
	16. Proaktif mencari peluang perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pemberian pelayanan publik.	8
Jumlah		7,60

Palembang, 29 September 2025
 Peserta

 YUDICO RAMBANG, SE
 NIP. 19830331 200903 1 002



REKAP NILAI PESERTA

Nama : Yudico Rambang, SE
NIP : 19830331 200903 1 002
Jabatan : Pjt. Perencana/Per. Rencana Kegiatan dan Anggaran
Instansi : Sekretariat DPRD Kabupaten OKI
Program : Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan IV Tahun 2025

Komponen	Sub Komponen	Nilai	Kualifikasi
Integritas	Tanggung Jawab	8	Baik
	Komitmen	8	Baik
	Kedisiplinan	8	Baik
	Kejujuran	8	Baik
	Konsistensi	8	Baik
	Pengambilan Keputusan Dilematis	8	Baik
Kerjasama	Rata-Rata	8,00	Baik
	Kerjasama Internal	8	Baik
	Kerjasama Eksternal	8	Baik
	Komunikasi	7	Baik
	Fleksibilitas	8	Baik
	Komitmen dalam Tim	8	Baik
Mengelola Perubahan	Rata-Rata	7,50	Baik
	Orientasi Pelayanan	7	Baik
	Adaptabilitas	8	Baik
	Pengembangan diri dan orang lain	8	Baik
	Orientasi pada hasil	7	Baik
	Inisiatif	8	Baik
Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku :		7,50	Baik

Keterangan Kualifikasi
9.99-10 Istimewa
7-8.99 Baik
5-6.99 Cukup
3-4.99 Kurang
1-2.99 Sangat Kurang

REKAP NILAI MENTOR

Nama Peserta : Yudico Rambang, SE
NIP : 19830331 200903 1 002
Jabatan : Pjt. Perencana/Per. Rencana Kegiatan dan Anggaran
Instansi : Sekretariat DPRD Kabupaten OKI
Program : Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan IV Tahun 2025

Nama Mentor : M. Iqbal Basa, SE
NIP : 19810416 201001 1 012
Jabatan : Pjt. Sekretaris Urup/Kabag Keuangan & Program
Instansi : Sekretariat DPRD Kabupaten OKI

Komponen	Sub Komponen	Nilai	Kualifikasi
Integritas	Tanggung Jawab	9	Istimewa
	Komitmen	9	Istimewa
	Kedisiplinan	9	Istimewa
	Kejujuran	9	Istimewa
	Konsistensi	9	Istimewa
	Pengambilan Keputusan Dilematis	9	Istimewa
Kerjasama	Rata-Rata	7,71	Baik
	Kerjasama Internal	9	Istimewa
	Kerjasama Eksternal	9	Istimewa
	Komunikasi	8	Baik
	Fleksibilitas	9	Istimewa
	Komitmen dalam Tim	9	Istimewa
Mengelola Perubahan	Rata-Rata	8,50	Baik
	Orientasi Pelayanan	8	Baik
	Adaptabilitas	9	Istimewa
	Pengembangan diri dan orang lain	9	Istimewa
	Orientasi pada hasil	9	Istimewa
	Inisiatif	9	Istimewa
Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku :		8,44	Baik

Keterangan Kualifikasi
9.99-10 Istimewa
7-8.99 Baik
5-6.99 Cukup
3-4.99 Kurang
1-2.99 Sangat Kurang

REKAP NILAI GABUNGAN PESERTA DAN MENTOR

Nama : Yudico Rambang, SE
NIP : 19830331 200903 1 002
Jabatan : Pjt. Perencana/Per. Rencana Kegiatan dan Anggaran
Instansi : Sekretariat DPRD Kabupaten OKI
Program : Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan IV Tahun 2025

Nama Mentor : M. Iqbal Basa, SE
NIP : 19810416 201001 1 012
Jabatan : Pjt. Sekretaris DPRD/Kabag Keuangan & Program
Instansi : Sekretariat DPRD Kabupaten OKI

Komponen	Sub Komponen	Nilai Peserta	Nilai Mentor	Nilai Rata-Rata	Kualifikasi
Integritas	Tanggung Jawab	8	9	8,70	Baik
	Komitmen	8	9	8,70	Baik
	Kedisiplinan	8	9	8,70	Baik
	Kejujuran	8	9	8,70	Baik
	Konsistensi	8	9	8,70	Baik
	Pengambilan Keputusan	8	9	8,70	Baik
Kerjasama	Rata-Rata	8,00	9,00	8,50	Baik
	Kerjasama Internal	8	9	8,70	Baik
	Kerjasama Eksternal	8	9	8,70	Baik
	Komunikasi	7	8	7,70	Baik
	Fleksibilitas	8	9	8,70	Baik
	Komitmen dalam Tim	8	9	8,70	Baik
Mengelola Perubahan	Rata-Rata	7,50	8,50	8,00	Baik
	Pelayanan Publik	7	8	7,70	Baik
	Adaptabilitas	8	9	8,70	Baik
	Pengembangan orang lain	8	9	8,70	Baik
	Orientasi pada hasil	7	8	7,70	Baik
	Inisiatif	8	9	8,70	Baik
Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku :		7,50	8,50	8,00	Baik

Keterangan Kualifikasi
9.99-10 Istimewa
7-8.99 Baik
5-6.99 Cukup
3-4.99 Kurang
1-2.99 Sangat Kurang

REKAP NILAI AKHIR SIKAP PERILAKU PESERTA

Nama Peserta : Yudico Rambang, SE
NIP : 19830331 200903 1 002
Jabatan : Pjt. Perencana/Per. Rencana Kegiatan dan Anggaran
Instansi : Sekretariat DPRD Kabupaten OKI
Program : Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan IV Tahun 2025

Nama Mentor : M. Iqbal Basa, SE
NIP : 19810416 201001 1 012
Jabatan : Pjt. Sekretaris DPRD/Kabag Keuangan & Program
Instansi : Sekretariat DPRD Kabupaten OKI

Komponen	Sub Komponen	Nilai Peserta	Nilai Mentor	Nilai Rata-Rata	Kualifikasi
Integritas	Tanggung Jawab	8	9	8,70	Baik
	Komitmen	8	9	8,70	Baik
	Kedisiplinan	8	9	8,70	Baik
	Kejujuran	8	9	8,70	Baik
	Konsistensi	8	9	8,70	Baik
	Pengambilan Keputusan	8	9	8,70	Baik
Kerjasama	Rata-Rata	8,00	9,00	8,50	Baik
	Kerjasama Internal	8	9	8,70	Baik
	Kerjasama Eksternal	8	9	8,70	Baik
	Komunikasi	7	8	7,70	Baik
	Fleksibilitas	8	9	8,70	Baik
	Komitmen dalam Tim	8	9	8,70	Baik
Mengelola Perubahan	Rata-Rata	7,50	8,50	8,00	Baik
	Pelayanan Publik	7	8	7,70	Baik
	Adaptabilitas	8	9	8,70	Baik
	Pengembangan orang lain	8	9	8,70	Baik
	Orientasi pada hasil	7	8	7,70	Baik
	Inisiatif	8	9	8,70	Baik
Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku :		7,50	8,50	8,00	Baik

Keterangan Kualifikasi
9.99-10 Istimewa
7-8.99 Baik
5-6.99 Cukup
3-4.99 Kurang
1-2.99 Sangat Kurang

Komponen	Sub Komponen	Nilai Peserta	Nilai Mentor	Nilai Rata-Rata	Kualifikasi
Integritas	Tanggung Jawab	8	9	8,70	Baik
	Komitmen	8	9	8,70	Baik
	Kedisiplinan	8	9	8,70	Baik
	Kejujuran	8	9	8,70	Baik
	Konsistensi	8	9	8,70	Baik
	Pengambilan Keputusan	8	9	8,70	Baik
Kerjasama	Rata-Rata	8,00	9,00	8,50	Baik
	Kerjasama Internal	8	9	8,70	Baik
	Kerjasama Eksternal	8	9	8,70	Baik
	Komunikasi	7	8	7,70	Baik
	Fleksibilitas	8	9	8,70	Baik
	Komitmen dalam Tim	8	9	8,70	Baik
Mengelola Perubahan	Rata-Rata	7,50	8,50	8,00	Baik
	Pelayanan Publik	7	8	7,70	Baik
	Adaptabilitas	8	9	8,70	Baik
	Pengembangan orang lain	8	9	8,70	Baik
	Orientasi pada hasil	7	8	7,70	Baik
	Inisiatif	8	9	8,70	Baik
Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku :		7,50	8,50	8,00	Baik

REKOMENDASI PENGEMBANGAN POTENSI DIRI:

Istimewa : 1. Memperhatikan nilai pada sub komponen pada formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal penguatan sikap perilaku untuk mendukung jabatan pimpinan pengawas.

Baik : 1. Memperhatikan nilai pada sub komponen pada formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam mendukung jabatan pimpinan pengawas.

Cukup : 1. Memperhatikan nilai pada sub komponen pada formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam mendukung jabatan pimpinan pengawas.

Kurang : 1. Memperhatikan nilai pada sub komponen pada formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam mendukung jabatan pimpinan pengawas.

Sangat Kurang : 1. Memperhatikan nilai pada sub komponen pada formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam mendukung jabatan pimpinan pengawas.



FORMULIR MENTOR

Nama Peserta : Yudico Rambang, SE Nama Mentor : M. Iqbal Basa, SE
 NIP : 19830331 200903 1 002 NIP : 19810416 201001 1 012
 Jabatan : Pj. Perencana/Plan. Rencana Kegiatan dan Anggaran Instansi : Pj. Sekretaris DPRD/Kabag Keuangan B.
 Instansi : Sekretariat DPRD Kabupaten OKI Instansi : Sekretariat DPRD Kabupaten OKI
 Program : Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan IV Tahun 2025 Program : Sekretariat DPRD Kabupaten OKI

Kompetensi	Sub Kompetensi	SKOR 1 - 10
INTEGRITAS	1. Mengingat rekan kerja atau bawahan untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi.	9
	2. Menunjukkan komitmen dan tanggung jawab terhadap penyelesaian tugas yang diembannya.	9
	3. Mengingat rekan kerja atau bawahan untuk melaksanakan tugas dan fungsi mereka sesuai dengan tempat waktu yang ada dan mematuhi ketentuan terkait waktu kerja yang berlaku dalam organisasi.	9
	4. Memberikan informasi yang dapat dipercaya kepada orang lain/ pihak lain sesuai dengan etika organisasi.	9
	5. Menerapkan norma atau aturan yang berlaku dalam organisasi secara konsisten dalam setiap situasi dalam lingkup pekerjaannya.	9
	6. Memberikan argumen dengan disertai pemahaman atas ketentuan yang berlaku di organisasi dan konsekuensinya dalam mengingatkan atau mengajak rekan kerja/ bawahan dalam penerapan aturan.	9
JUMLAH		54
KERJASAMA	9. Menyampaikan informasi dengan cukup jelas baik secara tertulis maupun lisan dalam merencanakan, melaksanakan, kerja pada unit/tim yang dipimpinnya.	9
	10. Melakukan koordinasi yang efektif dengan pihak-pihak relevan di lingkup satuan kerja/organisasi dalam rangka menjamin kinerja di lingkup unitnya.	9
	11. Aktif menjalin komunikasi dengan pemangku kepentingan eksternal organisasi dalam rangka menunjang kualitas layanan yang dikehendangkan organisasi.	8
	12. Merespon dengan positif adanya perbedaan atau kemajemukan dalam unit/tim kerja sehingga tetap fokus pada tujuan kerja yang dikehendaki.	9
MENGELOLA PERUBAHAN	13. Bertanggungjawab terhadap peran atau tugasnya dalam rangka mencapai sasaran atau tujuan tim yang telah disepakati.	9
	14. Aktif mencari informasi kebutuhan pemangku kepentingan dan memberikan penjelasan mengenai prosedur standar pelayanan yang berlaku sebagai upaya pemenuhan pelayanan publik yang efektif dan efisien.	8,80
	15. Aktif mengembangkan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan dalam pemberian pelayanan publik.	9
	16. Menggunakan cara yang beragam untuk memastikan bawahan memahami arahan penyelesaian tugas yang sesuai dengan target kerja yang diberikan dan SOP yang berlaku ketika menghadapi hambatan.	9
MENGELOLA PERUBAHAN	17. Mencari metode kerja alternatif yang lebih efektif untuk menyelesaikan pekerjaan terutama ketika menghadapi hambatan.	9
	18. Proaktif mencari peluang perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pemberian pelayanan publik.	9
JUMLAH		8,80

Palembang, 22 September 2025

M. Iqbal Basa, SE
 NIP. 19810416 201001 1 012



BAB II

DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN

A. Membangun Integritas

Integritas merupakan nilai fundamental yang wajib dimiliki oleh setiap pemimpin, khususnya oleh *Project Leader* dalam pelaksanaan Aksi Perubahan pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan IV Tahun 2025. Integritas dapat dimaknai sebagai bentuk kejujuran yang diwujudkan secara nyata dalam praktik kepemimpinan sehari-hari. Nilai-nilai integritas memiliki peran yang sangat krusial dalam tataran organisasi, khususnya di lingkungan Sekretariat DPRD kabupaten OKI yang dipimpin langsung oleh Project Leader, terutama dalam konteks penyelenggaraan Perencanaan Program di Lingkungan Organisasi.

Sebagai entitas pemerintahan yang berada pada garis terdepan dan paling dekat dengan masyarakat, pimpinan di tingkat kelurahan memegang peran strategis dalam mewujudkan tata kelola pelayanan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Nilai integritas menjadi fondasi utama agar tercipta hubungan saling percaya di antara seluruh elemen organisasi, sehingga tujuan akhir dari Aksi Perubahan dapat tercapai secara optimal.

Lebih dari sekadar kejujuran, integritas juga merefleksikan bagaimana seorang individu menampilkan dirinya dalam suatu kelompok, yang tercermin melalui sikap, perilaku, dan konsistensi antara perkataan, tindakan, serta prinsip-prinsip yang dianutnya. Integritas yang kokoh akan menjadikan pemimpin sebagai panutan yang mampu menggerakkan perubahan secara berkelanjutan dalam organisasi yang dipimpinnya.

Dalam Implementasi Pelatihan Kepemimpinan Pegawai (PKP) Angkatan IV tahun 2025 *Project Leader* Menggambil Judul Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Program di Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir, dalam hal untuk mencapai tujuan dari implementasi tersebut sebagai seorang pemimpin sangat dibutuhkan integritas yang sangat tinggi karena seorang pemimpin akan menjadi contoh dari seluruh bawahan yang dipimpinnya, sehingga organisasi tersebut dapat berjalan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan pelayanan publik dapat dilaksanakan secara optimal.

Kepemimpinan merupakan unsur fundamental yang menentukan keberhasilan sebuah perubahan organisasi, khususnya pada sektor publik yang memiliki tantangan kompleks seperti keterbatasan sumber daya, birokrasi yang panjang, serta kebutuhan koordinasi antarunit kerja. Dalam konteks pelaksanaan aksi perubahan **“Pengembangan Sistem Monitoring dan**



Evaluasi Perencanaan Program di Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir”, kepemimpinan tidak hanya memegang fungsi administratif, tetapi juga berperan sebagai penggerak, inovator, motivator, serta agen transformasi yang mampu menciptakan pembaruan di lingkungan kerja.

Aksi perubahan ini bertujuan memperbaiki sistem monitoring dan evaluasi (monev) perencanaan program yang selama ini dilakukan secara manual, tersebar, dan belum terintegrasi. Dibutuhkan pemimpin yang mampu mengelola perubahan, berpikir sistematis, bekerja kolaboratif, dan menggerakkan berbagai sumber daya agar inovasi dapat terlaksana dan berkelanjutan.

Berikut ini adalah beberapa bentuk Penerapan yang akan Project Leader Lakukan untuk Mencapai Tujuan Implementasi Aksi Perubahan Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Program di Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir :

1) Keteladanan Dalam Prilaku

Project Leader harus menjadi Teladan dalam sikap jujur, disiplin dan bertanggung jawab, dengan memberikan contoh nyata dalam bekerja secara profesional dan etis, dengan harapan pegawai lain akan terdorong untuk meniru sikap project leader tersebut;

2) Akuntabilitas Dalam Tugas

Project leader wajib mempertanggungjawabkan setia keputusan dan kebijakan yang diambil, baik kepada atasan maupun kepada masyarakat, evaluasi dan pelaporan yang rutin adalah bagian dari wujud akuntabilitas ini;

3) Anti-Korupsi dan Anti Gratifikasi

Project Leader harus menolak segala bentuk korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN) serta memastikan bawahannya juga memahami dan menghindari praktik tersebut, sosialisasi dan penegakan aturan harus dilakukan secara konsisten;

4) Pelayanan Berorientasi Pada Kepuasan Masyarakat

Seorang *Project leader* harus mampu berupaya memperbaiki kualitas kinerja kepada organisasi dan harus peka terhadap kebutuhan dan keluhan masyarakat serta cepat tanggap dalam memberikan solusi, mampu membuat aksi perubahan yang dibutuhkan seperti yang dilakukan oleh *project leader* mengadakan solusi dengan aksi perubahan optimalisasi di Sekretariat DPRD Kabupaten OKI

5) Komitmen terhadap nilai-nilai ASN



Sebagai *project leader* harus menjunjung tinggi nilai dasar asn : akuntabilitas,nasionalisme etika publik,komitmen mutu,dan anti korupsi ,nilai-nilai harus tertanam dalam setiap aktivitas pelayanan kepada masyarakat

Integritas bukan semata-mata merupakan sikap pribadi, melainkan juga menjadi fondasi utama dalam membangun sistem pelayanan publik yang sehat dan berkelanjutan. Seorang *Project Leader* yang menjunjung tinggi integritas akan mampu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, produktif, dan berorientasi pada hasil, serta menghasilkan pelayanan publik yang dapat dipercaya oleh masyarakat.

Dengan integritas yang kuat, *Project Leader* bukan hanya menjalankan tugasnya dengan baik, tetapi juga menjadi agen perubahan yang mampu membangun kepercayaan publik, mendorong efektivitas, serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Sebagai *Project leader* yang memegang peran yang sangat penting terhadap keberhasilan dari aksi perubahan, kemampuan untuk mengelola dan menggerakkan dan menginspirasi Tim agar berpikir kreatif dan punya keinginan untuk berubah menjadi lebih baik.. Peran ini menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa setiap anggota tim menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh tanggung jawab, profesionalisme, dan transparansi.

Beberapa aspek penting dari peran kepemimpinan pengawas dalam membangun integritas kinerja pelayanan adalah sebagai berikut :

- a) *Project Leader* harus menjadi contoh nyata dari integritas dalam kinerja pelayanan. Integritas bukan hanya tentang apa yang dikatakan, tetapi juga bagaimana seorang pemimpin bertindak. Dengan menunjukkan komitmen terhadap kejujuran, etika, dan tanggung jawab dalam setiap tindakan, seorang project leader akan membangun kepercayaan dari anggota timnya dan mempengaruhi perilaku mereka secara positif. Keteladanan ini penting dalam menciptakan budaya kerja yang berlandaskan integritas di seluruh tim.
- b) Setiap anggota tim bertanggung jawab atas pekerjaan yang mereka lakukan. Ini termasuk menegakkan standar akuntabilitas yang jelas dan memberikan ruang untuk pertanggungjawaban dalam setiap keputusan yang diambil. Akuntabilitas ini menjadi fondasi bagi terciptanya transparansi dalam proses pelayanan publik, di mana setiap tindakan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan sesuai prosedur.
- c) Bertanggung jawab untuk menciptakan sistem kerja yang transparan dan beretika, mulai dari perencanaan hingga tahap pelaksanaan kegiatan.. Kepemimpinan yang baik



berarti memastikan bahwa seluruh proses pelayanan dilakukan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku, serta mencegah segala bentuk penyimpangan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan menegakkan aturan yang jelas dan mengedepankan transparansi, integritas akan terjaga, dan kepercayaan publik terhadap pelayanan akan meningkat.

- d) Mendorong komunikasi terbuka dan kolaborasi, salah satu aspek penting dari integritas adalah keterbukaan komunikasi antara anggota tim, serta mengutamakan kolaborasi yang positif dan konstruktif. Dengan menciptakan lingkungan di mana setiap orang merasa aman untuk berbicara, berbagi ide, dan memberikan umpan balik, potensi terjadinya konflik atau penyimpangan dapat diminimalisir, dan kerja sama tim akan berjalan lebih efisien dan transparan.
- e) Memberikan Pengarahan dan Pembinaan Pengawas juga memiliki peran penting dalam membimbing anggota tim agar memahami pentingnya integritas dalam pelayanan publik. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan, mentoring, serta memberikan feedback yang membangun secara berkala. Dengan memberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya integritas, pengawas membantu membentuk sikap dan perilaku positif yang akan berkontribusi pada peningkatan kualitas kinerja pelayanan publik.
- f) Memantau dan Mengevaluasi Kinerja Tim secara Berkelanjutan, project leader harus aktif dalam memantau kinerja tim dan melakukan evaluasi secara berkala. Dengan demikian, ia dapat dengan cepat mengidentifikasi potensi masalah atau penyimpangan yang mungkin terjadi, serta mengambil tindakan korektif yang diperlukan. Pemantauan ini memastikan bahwa tim tetap berada pada jalur yang benar, sesuai dengan nilai-nilai integritas yang telah ditetapkan.
- g) Menyediakan Mekanisme Pengaduan Yang Transparan, sebagai bagian dari integritas pelayanan, pengawas harus memastikan adanya mekanisme pengaduan yang terbuka dan transparan, di mana masyarakat atau tim dapat melaporkan masalah tanpa takut akan dampak negatif. Ini menciptakan sistem yang dapat mendeteksi dan menanggapi masalah secara cepat dan adil, meningkatkan kepercayaan terhadap pelayanan yang diberikan.

Dengan memainkan peran ini secara efektif, *project leader* tidak hanya memastikan bahwa aksi perubahan berjalan sesuai dengan tujuan, tetapi juga menciptakan budaya kerja yang berlandaskan integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Hasil akhirnya adalah peningkatan kualitas kinerja pelayanan publik yang lebih profesional, efektif, dan dapat dipercaya oleh masyarakat.



B. Pengelolaan Pelayanan (Pemanfaatan TI)

Dalam rangka mewujudkan Aksi Perubahan Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Program perlu diarahkan pada pendekatan yang berorientasi pada pemanfaatan Teknologi Informasi (TI). Pemanfaatan TI bukan hanya menjadi instrumen pendukung, tetapi juga menjadi katalisator dalam transformasi pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Berikut ini adalah penjabaran terkait bagaimana pengelolaan budaya Pelayanan berbasis TI dapat diimplementasikan sebagai Aksi Perubahan di Sekretariat DPRD Kabupaten OKI :

1) Transformasi Budaya Kerja menuju Digital Mindset

Project Leader memulai Aksi Perubahan ini dengan membangun Mindset seluruh pegawai kelurahan, dalam hal ini mencakup pemahaman bahwa TI bukan hanya alat bantu, tetapi bagian integral dari proses pelayanan;

2) Pemanfaatan Media Sosial

Project Leader membangun Kanal komunikasi dua arah dengan Bagian bagian di Sekretariat DPRD Kabupaten OKI melalui INOVASI aksi Perubahan Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Program di Sekretariat DPRD Kabupaten OKI Menggunakan Media Sosial Seperti *Facebook, instagram, dan Whatsapp* Sekretariat DPRD Kabupaten OKI

Guna memastikan pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) berjalan secara efektif dan efisien, diperlukan tata kelola TI yang terstruktur dan berkelanjutan. Pengelolaan teknologi informasi yang baik harus didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten serta partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, termasuk para penyedia layanan di lini terdepan. Hal ini penting untuk mendukung terciptanya pelayanan publik yang prima, yang merupakan tujuan utama dari setiap pemerintah daerah.

Saat ini, pemerintah daerah berlomba-lomba dalam menerapkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sebagai bagian dari transformasi digital pelayanan publik. Pemanfaatan TI dalam konteks ini mencakup berbagai aktivitas yang saling terintegrasi, seperti pengolahan data, manajemen informasi, hingga penerapan sistem manajemen berbasis digital.

Dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan penerapan konektivitas internet dalam tata kelola pemerintahan, diharapkan berbagai persoalan birokrasi dapat diatasi secara lebih efisien. Selain itu, penerapan TI juga mendorong terciptanya inovasi, peningkatan



produktivitas, perluasan jangkauan pelayanan kepada masyarakat, serta penghematan biaya operasional. Dengan demikian, TI menjadi alat strategis dalam mewujudkan pelayanan publik yang modern, adaptif, dan berkelanjutan.

Pelayanan publik yang prima bukan hanya sekadar mengikuti tren global, melainkan diarahkan untuk mewujudkan *good governance*, yang mencakup tata pemerintahan yang baik, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pemerintahan. Penerapan teknologi informasi diharapkan dapat memberikan layanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat, sehingga langkah ini menjadi sangat strategis. Namun, dalam penerapannya, tantangan akan selalu ada; diperlukan proses, waktu, dan tahapan yang berkesinambungan untuk mencapai tujuan tersebut.

Penerapan teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan publik memberikan peluang besar bagi pengembangan daerah. Daerah dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah proses pelayanan, memperkenalkan potensi daerah, serta meningkatkan interaksi dengan masyarakat dan dunia bisnis.

C. Pengelolaan TIM

Dari sisi definisi, tim adalah sekumpulan orang dengan ketrampilan saling melengkapi dan komitmen untuk mencapai tujuan bersama melalui proses kerja sama dan saling bertanggung jawab. Sementara itu, efektif berarti usaha untuk mencapai tujuan sesuai dengan waktu yang ditetapkan, di mana efektif juga diartikan sebagai upaya yang menghasilkan tepat guna. Dengan demikian, tim efektif dapat diartikan sebagai tim yang berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Agar pekerjaan yang dilakukan tim berjalan dengan efektif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan atas aksi perubahan ini, project leader menerapkan prinsip kepemimpinan dengan mengajak dan menggerakkan anggota tim. Upaya pengelolaan tim yang efektif dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu :

1. Perencanaan aksi kegiatan dengan melibatkan tim
 - a. Penjadwalan kegiatan dan pemetaan sumber daya yang ada
 - b. Mengorganisasikan tim dan sumber daya
 - c. Sosialisasi uraian tugas bagi setiap anggota tim
2. Pelaksanaan kegiatan
 - a. Menggerakkan tim



b. Berkoordinasi dengan tim

3. Monitoring dan evaluasi

a. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan

b. Pemecahan masalah, mencari alternatif solusi dan melakukan koreksi dalam pengelolaan tim.

Dalam pembentukan tim ada beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan yaitu :

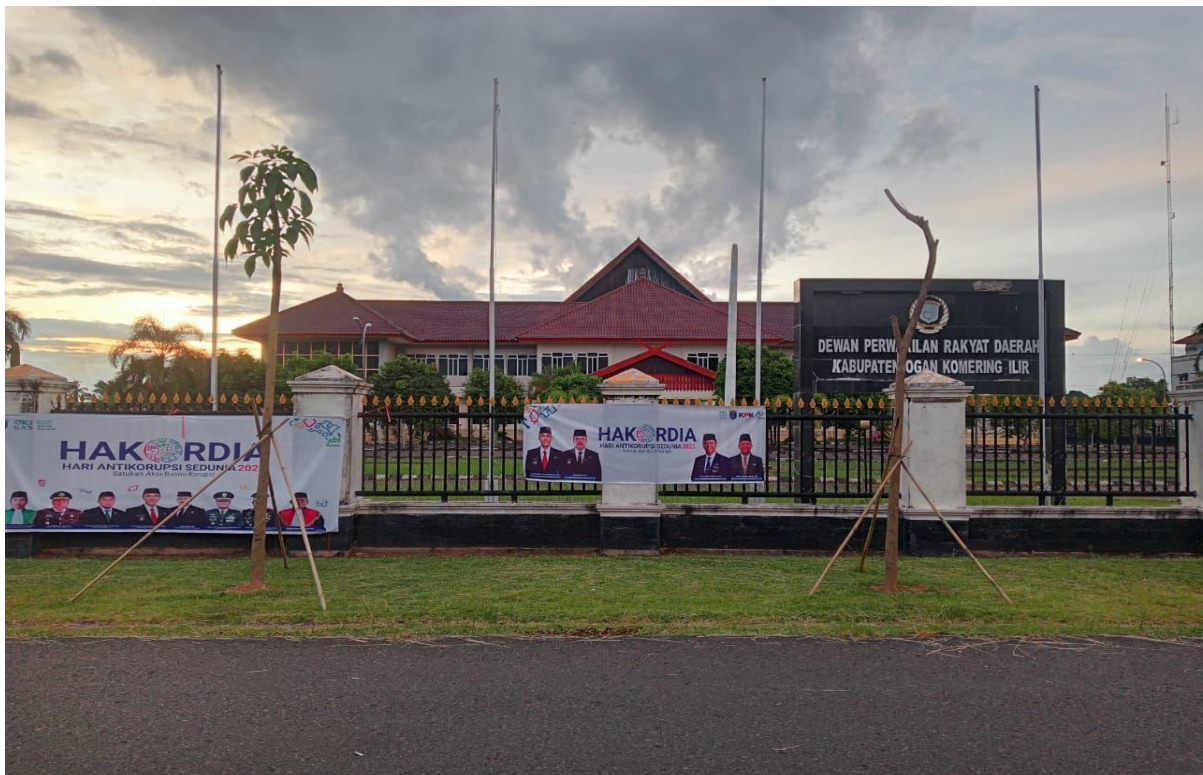
1. Seorang pemimpin harus memberikan umpan balik secara rutin kepada anggota tim mengenai kinerja mereka yaitu mulai dari perencanaan dimana project leader harus memetakan kebutuhan dan potensi atau kompetensi sumber daya yang ada untuk dapat dioptimalkan guna mendukung implementasi aksi perubahan.
2. Pembagian tugas dilakukan berdasarkan kompetensi sehingga dapat meningkatkan peluang pekerjaan yang lebih mudah dan cepat diselesaikan seperti kompetensi di bidang Administrasi, teknologi dan informasi maupun memiliki pengalaman mengoperasikan berbagai sistem informasi, serta anggota administrasi memiliki latar belakang ketugasan yang sesuai dengan tugas dalam keanggotaan tim.
3. Pembagian tugas yang disesuaikan dengan kompetensi dan tugas dan fungsi yaitu intensitas penggunaan IT dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
4. Memastikan seluruh anggota aksi perubahan bekerja sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan, hal ini penting dilakukan karena merupakan bentuk perbaikan layanan organisasi,

Memberikan motivasi kepada anggota selama proses implementasi aksi perubahan dengan melakukan diskusi diantara anggota. *Project leader* terus memotivasi anggotanya agar merasa ikut memiliki dan mendukung target kinerja tim untuk mencapai Tujuan Aksi Perubahan Inovasi Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Program di Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir

TIM EFEKTIF SEKRETARIAT DPRD KAB OKI

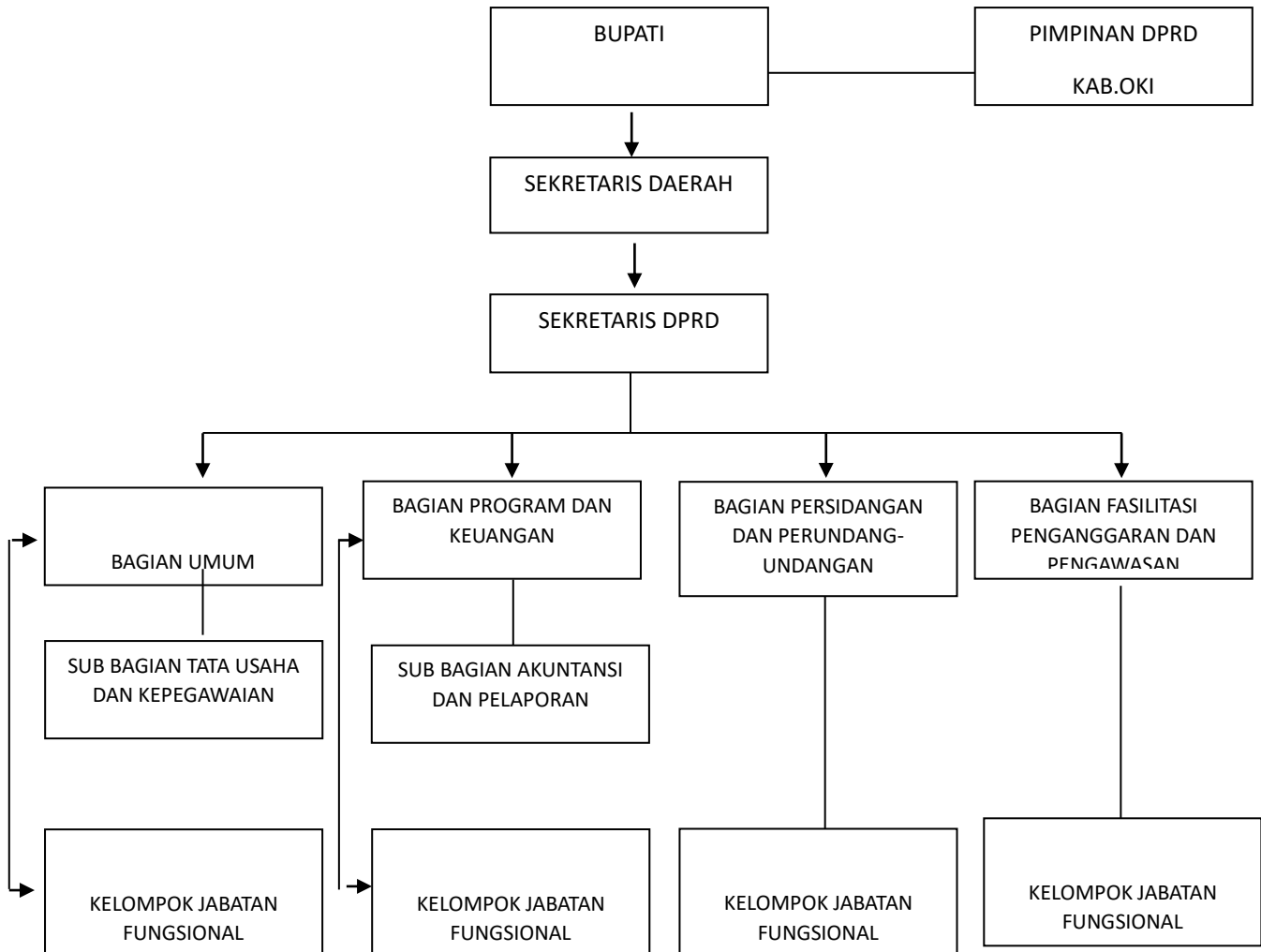


Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten OKI



Struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir lebih jelas dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR



Sumber : Sekeretaryat DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir



KINERJA ORGANISASI YANG DIHARAPKAN

Berdasarkan penjelasan di atas, beberapa isu permasalahan yang dihadapi Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir saat ini dan kondisi yang diharapkan dapat dijelaskan dalam table berikut ini.

Tabel 2.9

Kinerja Organisasi yang diharapkan

KONDISI SAAT INI	KONDISI YANG DIHARAPKAN
Pengelolaan Surat menyurat Masih menggunakan cara manual dalam Penataan Administrasi Perkantoran	Pengelolaan Surat Menyurat pada Sekretariat DPRD telah menerapkan pelayanan secara Digital
Belum optimalnya Penataan Administrasi Reses dan Kegiatan DPRD.	Optimalnya Penataan Administrasi Reses dan Kegiatan DPRD.
Belum terintegrasinya kegiatan antar bagian di Sekretariat DPRD	Terintegrasinya kegiatan antar bagian di Sekretariat DPRD
Belum Optimalnya Pelayanan Tamu di Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir	Optimalnya Pelayanan tamu di Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir
Lambatnya penetapan Anggaran Pendapatan Daerah	Penetapan Anggaran Pendapatan Daerah Tepat Waktu



BAB III

DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN

2.1 Pendahuluan

Perencanaan program dan kegiatan merupakan tahapan strategis dalam siklus manajemen pemerintahan daerah. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan sangat ditentukan oleh ketepatan perencanaan yang dilakukan berdasarkan kebutuhan riil dan berbasis data yang akurat. Dalam konteks Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), perencanaan program dan kegiatan memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Namun, berdasarkan hasil pengamatan, analisis dokumen, dan diskusi dengan berbagai pihak, masih terdapat sejumlah persoalan mendasar dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan penganggaran di Sekretariat DPRD. Persoalan-persoalan tersebut berdampak pada efektivitas dukungan Sekretariat DPRD terhadap kinerja lembaga DPRD itu sendiri. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mendalam terhadap permasalahan yang terjadi guna merumuskan langkah-langkah perbaikan yang tepat, sistematis, dan berkelanjutan.

II. Identifikasi Isu

Berdasarkan pengamatan dan kajian, terdapat tiga isu utama dalam perencanaan program, kegiatan, dan anggaran Sekretariat DPRD, yaitu:

1. Ketidaksesuaian antara program/kegiatan dengan kebutuhan nyata DPRD

Program dan kegiatan masih bersifat rutinitas, belum berbasis pada analisis kebutuhan riil.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, keberadaan Sekretariat DPRD memiliki posisi strategis sebagai unsur pelayanan administratif yang bertugas memberikan dukungan terhadap pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan oleh DPRD. Oleh karena itu, kualitas perencanaan program, kegiatan, dan anggaran di Sekretariat DPRD menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas kedewanan. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai tantangan yang menghambat efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, terutama yang berkaitan dengan tiga isu utama, yaitu ketidaksesuaian antara program dan kegiatan dengan kebutuhan nyata DPRD, proses penyusunan anggaran yang belum terintegrasi, serta keterbatasan sumber daya manusia dalam bidang perencanaan dan penganggaran.



Permasalahan pertama yang cukup mendasar adalah ketidaksesuaian antara program dan kegiatan Sekretariat DPRD dengan kebutuhan nyata lembaga legislatif itu sendiri. Idealnya, setiap program dan kegiatan yang direncanakan harus berangkat dari hasil analisis kebutuhan dan evaluasi kinerja DPRD agar memiliki relevansi yang tinggi terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi kedewanan. Namun kenyataannya, banyak program yang bersifat rutin dan administratif tanpa mempertimbangkan kondisi serta kebutuhan aktual anggota DPRD. Hal ini sering kali disebabkan oleh lemahnya komunikasi antara Sekretariat dengan pimpinan maupun alat kelengkapan DPRD saat proses perencanaan berlangsung. Tidak jarang kegiatan yang diusulkan lebih menekankan aspek formalitas dan kelengkapan dokumen daripada orientasi hasil (outcome) yang ingin dicapai. Pola ini menciptakan ketergantungan pada kegiatan berulang dari tahun ke tahun tanpa adanya evaluasi mendalam terhadap efektivitasnya. Akibatnya, muncul kesenjangan antara perencanaan dan kebutuhan nyata, yang berdampak pada rendahnya kepuasan anggota DPRD terhadap layanan kesekretariatan serta inefisiensi dalam penggunaan anggaran daerah.

Ketidaksesuaian ini juga memperlihatkan bahwa perencanaan di lingkungan Sekretariat DPRD belum sepenuhnya menerapkan prinsip perencanaan berbasis bukti (evidence-based planning). Dalam manajemen publik modern, sebuah program dikatakan efektif apabila dirancang berdasarkan data, analisis kebutuhan, dan hasil evaluasi yang jelas. Kelemahan dalam proses ini menyebabkan kegiatan yang dilaksanakan tidak memberikan nilai tambah bagi kinerja DPRD secara keseluruhan. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih partisipatif dalam penyusunan rencana kerja Sekretariat DPRD dengan melibatkan unsur-unsur DPRD secara langsung agar hasilnya benar-benar mencerminkan kebutuhan riil di lapangan. Selain itu, setiap tahun perlu dilakukan evaluasi sistematis terhadap kesesuaian program dengan capaian kinerja, sehingga perencanaan tahun berikutnya menjadi lebih adaptif dan berorientasi hasil.

2. Proses penyusunan anggaran yang kurang terintegrasi

Terjadi perbedaan data antara perencanaan dan penganggaran karena pemanfaatan aplikasi e-planning dan e-budgeting belum optimal.

Masalah kedua yang menjadi perhatian adalah proses penyusunan anggaran yang belum terintegrasi secara menyeluruh. Dalam sistem pemerintahan daerah, perencanaan dan penganggaran seharusnya menjadi dua sisi yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Namun dalam kenyataan, masih sering ditemukan bahwa dokumen perencanaan, seperti rencana strategis dan rencana kerja tahunan, tidak sepenuhnya



sinkron dengan dokumen anggaran. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan koordinasi antara bagian perencanaan, keuangan, dan bagian-bagian lain di lingkungan Sekretariat DPRD. Proses penyusunan anggaran yang dilakukan dalam waktu singkat dan kurangnya komunikasi lintas bidang menyebabkan penganggaran tidak mampu mengakomodasi kebutuhan prioritas secara optimal. Selain itu, ketiadaan sistem informasi yang terintegrasi membuat data dan informasi perencanaan serta penganggaran berjalan secara terpisah, sehingga konsistensi antara perencanaan dan realisasi anggaran menjadi sulit terjaga.

Dampak dari proses penyusunan anggaran yang tidak terintegrasi sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan program. Ketika perencanaan tidak terhubung secara baik dengan anggaran, maka akan terjadi ketidakseimbangan antara target kegiatan dan ketersediaan dana. Hal ini dapat menimbulkan tumpang tindih kegiatan, keterlambatan realisasi, bahkan revisi anggaran di tengah tahun. Situasi semacam ini tentu menghambat kinerja Sekretariat DPRD dalam memberikan dukungan yang cepat dan tepat kepada DPRD. Dalam konteks ini, penguatan integrasi antara perencanaan dan penganggaran menjadi sangat penting. Sekretariat DPRD perlu membangun sistem kerja berbasis pendekatan integratif, di mana seluruh proses mulai dari perumusan program, penyusunan anggaran, hingga evaluasi dilakukan secara terkoordinasi dan transparan. Pemanfaatan sistem informasi perencanaan dan penganggaran digital, seperti aplikasi e-Planning dan e-Budgeting, dapat menjadi solusi strategis dalam mewujudkan proses yang lebih efisien dan akuntabel. Sistem ini akan memudahkan sinkronisasi data, mempercepat proses administrasi, serta meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan anggaran.

3. Keterbatasan SDM perencanaan dan penganggaran

Jumlah dan kompetensi perencana terbatas, sehingga kualitas dokumen perencanaan belum optimal.

Selain kedua isu tersebut, persoalan keterbatasan sumber daya manusia dalam bidang perencanaan dan penganggaran juga menjadi tantangan utama yang harus segera diatasi. SDM merupakan faktor kunci dalam keberhasilan organisasi, karena kualitas perencanaan sangat bergantung pada kemampuan analitis, teknis, dan manajerial para aparatur yang terlibat di dalamnya. Namun di Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir, jumlah pegawai yang memiliki latar belakang keahlian khusus di bidang perencanaan pembangunan daerah dan keuangan publik masih sangat terbatas. Banyak aparatur yang belum memiliki pelatihan formal maupun sertifikasi yang mendukung tugas perencanaan



dan penyusunan anggaran. Kondisi ini menyebabkan proses penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran sering kali dilakukan secara administratif semata, tanpa analisis mendalam terhadap capaian kinerja dan kebutuhan strategis lembaga.

Ketiga isu tersebut saling berhubungan dan membentuk mata rantai permasalahan yang kompleks. Ketidaksesuaian program dengan kebutuhan DPRD menyebabkan hasil kerja sekretariat tidak optimal, sementara proses penyusunan anggaran yang tidak terintegrasi memperburuk efektivitas pelaksanaan program. Pada saat yang sama, keterbatasan SDM membuat organisasi sulit melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Jika ketiga permasalahan ini tidak segera ditangani, maka kinerja Sekretariat DPRD akan terus mengalami stagnasi dan kesulitan dalam memenuhi tuntutan pelayanan administratif yang semakin dinamis. Dampak akhirnya adalah menurunnya kualitas dukungan terhadap pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD, serta berkurangnya kepercayaan publik terhadap efektivitas lembaga perwakilan daerah.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis dan terukur. Sekretariat DPRD harus memperkuat mekanisme konsultasi internal dengan DPRD agar setiap program dan kegiatan benar-benar sesuai dengan kebutuhan lembaga. Proses penyusunan anggaran perlu dirancang secara partisipatif, dengan melibatkan seluruh bagian sejak tahap perencanaan awal agar setiap kebutuhan dapat diakomodasi secara proporsional. Di sisi lain, penggunaan sistem digital yang terintegrasi akan membantu meningkatkan akurasi data dan mempercepat proses penyusunan perencanaan serta penganggaran. Dalam jangka panjang, strategi penguatan kapasitas SDM menjadi kunci keberhasilan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat DPRD. Peningkatan kompetensi aparatur, penguasaan teknologi informasi, serta pembentukan jabatan fungsional perencana akan menjadi fondasi penting bagi peningkatan kinerja organisasi.

Dengan penerapan langkah-langkah tersebut secara konsisten, Sekretariat DPRD dapat bertransformasi menjadi institusi yang profesional, responsif, dan adaptif terhadap kebutuhan DPRD serta dinamika pembangunan daerah. Perencanaan yang berbasis kebutuhan dan bukti, anggaran yang terintegrasi dan transparan, serta SDM yang kompeten akan menciptakan sinergi positif dalam mendukung DPRD menjalankan fungsi-fungsinya secara optimal. Ke depan, diharapkan Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir mampu menjadi contoh bagi lembaga kesekretariatan lainnya dalam membangun sistem tata kelola yang efektif, efisien, dan akuntabel demi mewujudkan pemerintahan daerah yang berdaya saing dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

III. Analisis Isu dengan AKPK dan USG

1. Penapisan Isu (AKPK)

Isu	Aktual	Kekhalayakan	Problematis	Kelayakan	Skor
Masih manualnya penyusunan laporan perencanaan dan program penganggaran	4	4	4	3	15
Proses penyusunan anggaran kurang terintegrasi	3	4	3	3	13
Keterbatasan SDM perencanaan dan penganggaran	3	3	4	2	12

Hasil: Skor tertinggi adalah **Masih manualnya penyusunan laporan perencanaan dan program penganggaran (15 poin)**.

2. Penapisan Isu (USG)

Isu	Urgency	Seriousness	Growth	Skor
Masih manualnya penyusunan laporan perencanaan dan program penganggaran	4	4	4	12
Proses penyusunan anggaran kurang terintegrasi	3	4	3	10
Keterbatasan SDM perencanaan dan penganggaran	3	3	3	9

Hasil: Skor tertinggi adalah **Masih manualnya penyusunan laporan perencanaan dan program penganggaran (12 poin)**.

IV. Core Issue

Berdasarkan analisis AKPK dan USG, ditetapkan *core issue*:

Masih manualnya penyusunan laporan perencanaan dan program penganggaran di Sekretariat DPRD.

Alasan:

- Aktual dan sering terjadi setiap tahun.
- Berdampak serius terhadap efektivitas penggunaan anggaran dan kinerja DPRD.



- Jika tidak diatasi, masalah akan berulang dan memperlemah akuntabilitas Sekretariat DPRD.

V. Analisis Penyebab dengan *Fishbone*

Faktor Penyebab Utama:

1. **Man (SDM)**

Kompetensi perencana terbatas.

Minim pelatihan teknis.

Beban kerja tidak seimbang.

2. **Method (Metode)**

Perencanaan masih rutinitas.

Tidak ada instrumen baku kebutuhan DPRD.

Evaluasi program tidak dimanfaatkan optimal.

3. **Machine (Sarana/IT)**

Aplikasi *e-planning* belum optimal.

Data DPRD tidak terdokumentasi baik.

Kurang integrasi antar-OPD.

4. **Material (Data/Informasi)**

Data fungsi DPRD masih parsial.

Informasi kebutuhan sering bersifat lisan.

Minim analisis capaian kinerja.

5. **Money (Anggaran)**

Alokasi terbatas untuk inovasi.

Anggaran lebih banyak untuk operasional.

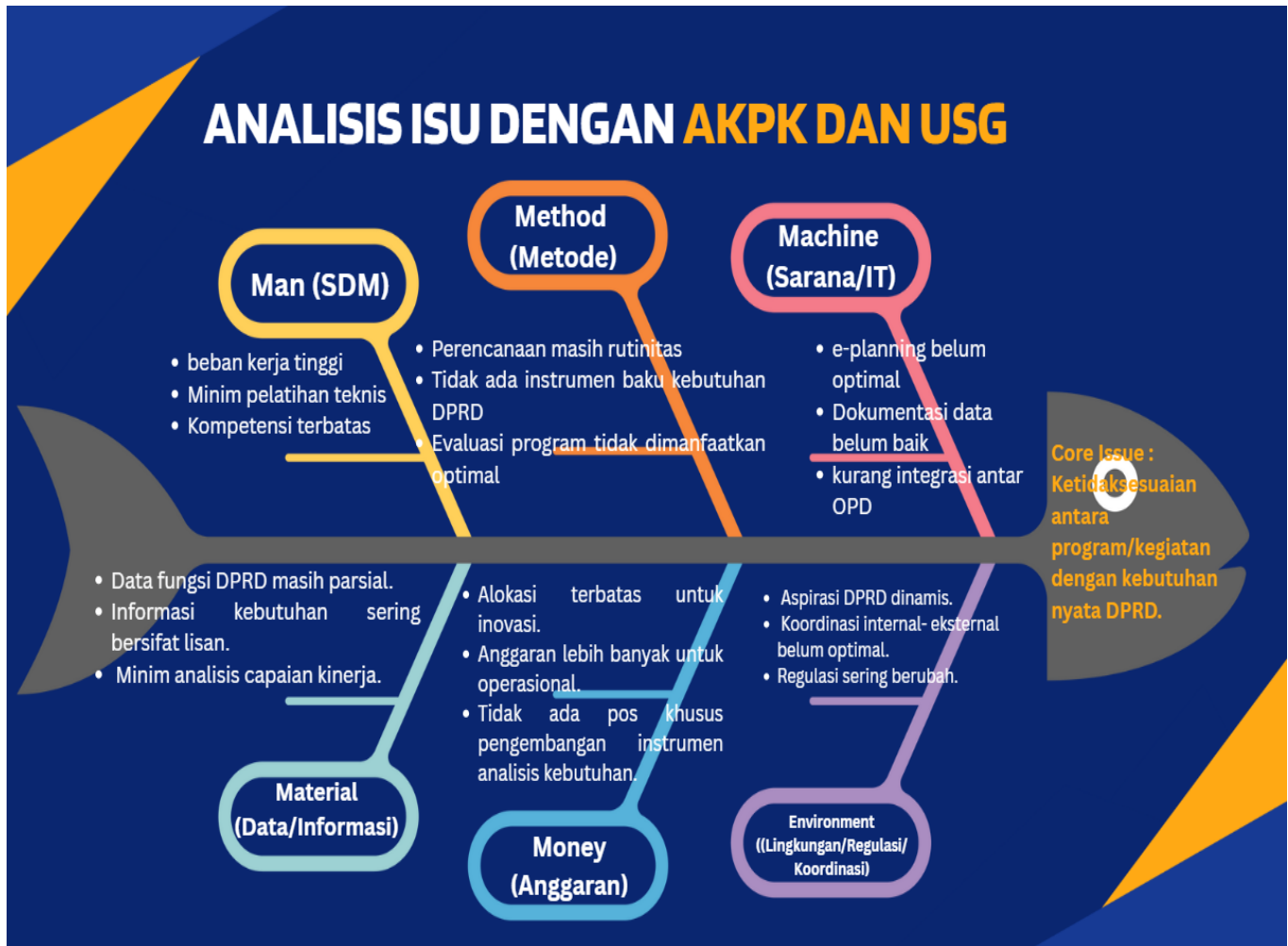
Tidak ada pos khusus pengembangan instrumen analisis kebutuhan.

6. **Environment (Lingkungan/Regulasi/Koordinasi)**

Aspirasi DPRD dinamis.

Koordinasi internal-eksternal belum optimal.

Regulasi sering berubah.



VI. Alternatif Rencana Aksi Perbaikan

1. **Penyusunan instrumen analisis kebutuhan DPRD** berbasis fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
2. **Membangun forum koordinasi internal dan eksternal** untuk sinkronisasi program/kegiatan.
3. **Pelatihan teknis perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja** untuk perencana dan pengelola anggaran.
4. **Monitoring dan evaluasi rutin** untuk memastikan kesesuaian program dengan kebutuhan DPRD.

VII. Output yang Diharapkan

- Dokumen perencanaan (Renja, RKA) selaras dengan kebutuhan DPRD dan prioritas pembangunan daerah.
- Indikator kinerja lebih jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Efisiensi anggaran meningkat karena program/kegiatan tepat sasaran.
- Peningkatan kualitas dukungan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan fungsi DPRD.



Kesimpulan:

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa core issue utama dalam perencanaan program, kegiatan, dan anggaran di Sekretariat DPRD adalah ketidaksesuaian program/kegiatan dengan kebutuhan nyata DPRD. Permasalahan ini muncul karena lemahnya perencanaan berbasis data, metode penjangkaran kebutuhan yang belum baku, keterbatasan pemanfaatan teknologi, hingga rendahnya kapasitas SDM.

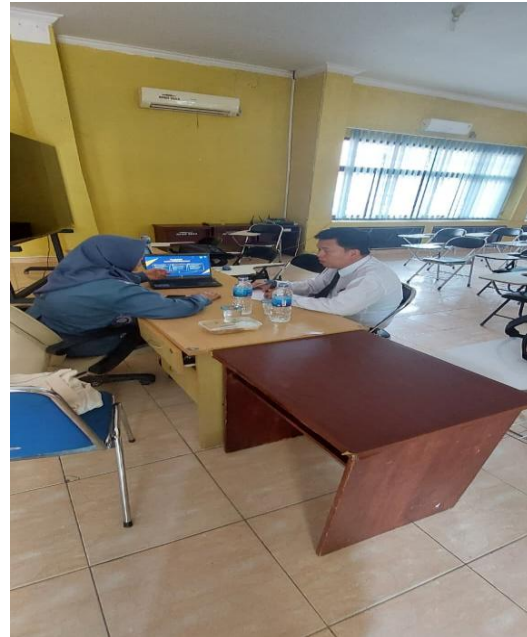
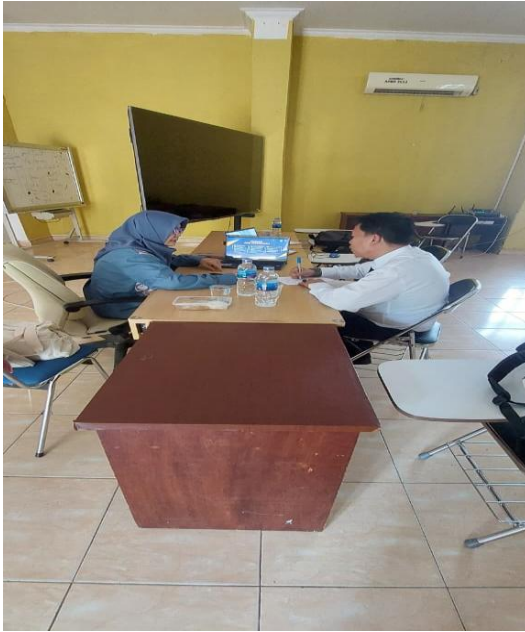
Jika tidak segera ditangani, isu ini dapat berdampak pada rendahnya kualitas dukungan sekretariat terhadap DPRD, ketidakefisienan penggunaan anggaran, dan menurunnya citra Sekretariat DPRD dalam memberikan pelayanan.

A. Capaian dan Bukti Perbaikan Kualitas Sistem Monev Perencanaan

Untuk meningkatkan kinerja pelayanan organisasi khususnya dalam kualitas sistem monev perencanaan memerlukan pendekatan sistematis dan terukur mengingat tahapan dalam mencapai. Rencana aksi perubahan dibatasi waktu yang sangat singkat, dalam hal ini Project Leader. Untuk dapat memaksimalkan waktu yang ada dalam mencapai seluruh tahapan dalam aksi perubahan. Dalam pelaksanaannya Aksi Perubahan jangka Pendek yang dilaksanakan mulai. Mulai Tanggal 12 Oktober 2025 sampai dengan 10 Desember 2025 (60 hari kalender) ini adalah dalam. Rangka mewujudkan terlaksananya Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Program untuk menghasilkan administrasi perencanaan yang lebih efektif dan efisien di kantor Sekretariat DPRD Kabupaten OKI. Adapun tahapan yang ditempuh dan rincian hasil capaian Aksi Perubahan. Pada jangka pendek sesuai *milestone* adalah sebagai Berikut:

1. Koordinasi dengan dan Coach dan Mentor

Pada Tanggal 10 Oktober 2025 setelah seminar rancangan aksi perubahan, dilaksanakan evaluasi dan pembahasan hasil seminar Rancangan Aksi Perubahan dengan Coach sebagai pembimbing, Kami diberikan pengarah oleh pembimbing terkait solusi yang menjadi pertanyaan dan Saran dari Narsumber/ penguji, dan tahap- tahapan dalam pelaksanaan dari implementasi aksi perubahan.



Tahapan awal pelaksanaan aksi perubahan juga dimulai dengan berkonsultasi secara langsung kepada Sekretaris DPRD Kabupaten OKI, yang berperan sebagai mentor. Konsultasi ini bertujuan untuk memperoleh dukungan moral dan struktural terhadap program Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Program di Sekretariat DPRD Kabupaten OKI. Dalam pertemuan ini, penanggung jawab memaparkan secara rinci rencana pelaksanaan aksi perubahan, mulai dari latar belakang, urgensi, sasaran kegiatan, hingga bentuk kolaborasi yang akan dilakukan dengan berbagai pihak.

Konsultasi dengan mentor memberikan arahan yang sangat signifikan bagi kesuksesan aksi perubahan. Peserta mendapat penguatan terkait urgensi perubahan, relevansi judul, kelayakan inovasi, serta dukungan penuh dari pimpinan. Dengan demikian, hasil konsultasi ini menjadi dasar yang kuat untuk melanjutkan tahap implementasi aksi perubahan.



Pembentukan Tim Efektif merupakan salah satu tahapan krusial dalam keberhasilan pelaksanaan aksi perubahan. Tim efektif menjadi motor penggerak yang memastikan seluruh rangkaian kegiatan inovasi dapat berjalan secara terstruktur, terkoordinasi, dan sesuai dengan arah perubahan yang telah direncanakan. Pada aksi perubahan dengan judul **“Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Program di Sekretariat DPRD Kabupaten OKI”**, keberadaan tim yang solid dan memiliki kompetensi pada bidangnya masing-masing menjadi kunci utama agar inovasi sistem ini dapat benar-benar diimplementasikan dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas perencanaan.





Pembentukan Tim fektif berdasarkan keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten OKI Nomor : 900/712/SETWAN/2025 tanggal 15 Oktober 2025 .



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
SEKRETARIAT DPRD

Jalan H. Sulaiman Raden Anom Kayugung
Telepon : (0712) 321390, Faksimile : (0712) 321390
Laman www.setwan.kaboki.go.id, Email setwankaboki@gmail.com

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ILIR,

NOMOR: 900/ 712/SETWAN/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN
PENGEMBANGAN SISTEM MONITORING DAN EVALUASI PERENCANAAN
PROGRAM DI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Aksi Perubahan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan ke IV Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 tentang Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Program di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komerling Ilir.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewa Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komerling Ilir tentang Pembentukan Tim Efektif Aksi Perubahan.
- Mengingat : 1. Surat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 800.2.4.1/3074/BPSDMD/2025 perihal Pemanggilan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan IV (BLUD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025;
2. Surat Perintah Tugas Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komerling Ilir Nomor 090/153/Setwan/2025 tanggal 22 Agustus 2025 untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) yang dimulai dari tanggal 25 Agustus s.d 13 Desember 2025

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TENTANG PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN PENGEMBANGAN SISTEM MONITORING DAN EVALUASI PERENCANAAN PROGRAM DI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
- PERTAMA : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk menjadi Tim Efektif dalam Aksi Perubahan Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Program di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komerling Ilir
- KEDUA : Nama -- nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai mampu dan cakap untuk menjadi Tim Efektif Aksi Perubahan
- KETIGA : Tim Efektif Aksi Perubahan melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam lajur 4 pada lampiran Keputusan ini
- KEEMPAT : Keputusan ini mula berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan terlaksananya aksi perubahan ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Palembang
Pada Tanggal : September 2025

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN
OGAN KOMERING ILIR
MUH IQBAL BASA, SE
Pembina Tingkat I Irb
NIP. 19810416 201001 1 012

LAMPIRAN : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komerling Ilir Nomor : 900/ 712/SETWAN/2025 Tanggal : 15 September 2025

DAFTAR TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN PENGEMBANGAN SISTEM MONITORING
DAN EVALUASI PERENCANAAN PROGRAM DI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN
OGAN KOMERING ILIR

No	Nama	Jabatan dalam Tim Efektif Aksi Perubahan	Tugas
1	Muh Iqbal Basa, SE NIP. 19810416 201001 1 012 Sekretaris DPRD Kab. OKI	Mentor	1. Melakukan monitoring mengenai pertimbangan kegiatan aksi perubahan 2. Membantu memberikan saran dan arahan apabila terdapat permasalahan dalam penyusunan aksi perubahan. 3. Memberikan dukungan terhadap penyusunan aksi perubahan.
2	Dra. Hariyati, SH, MM NIP. 19670523 199003 1 0005 Widyaiswara Ahli Madya Prov Sumatera Selatan	Coach	1. Melakukan pembimbingan, monitoring dan evaluasi terhadap Action Leader. 2. kut membantu memberikan saran dan arahan. 3. Memberikan dukungan terhadap penyusunan aksi perubahan.
3	Yudico Rambang, SE NIP. 19830331 200903 1 002 Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran pada Bagian Program dan Keuangan	Action Leader	1. Merencanakan, mengkomunikasikan, dan melakukan koordinasi mengenai pelaksanaan aksi perubahan. 2. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan stakeholders. 3. Menyiapkan dan membagikan undangan rapat. 4. Melaporkan perkembangan aksi perubahan kepada mentor dan coach.
4	Zainal Abidin, S.Sos NIP. 19830203 200701 1 005 Kasubag Akuntansi dan Pelaporan	Sekretaris	1. Membantu membuat draft kerja sama dengan stakeholder. 2. Mengkoordinir hasil pekerjaan masing-masing.
5	Yenny Mandasari, SH NIP. 19881010 201001 2 007 Penyusun Rencana Kegiatandan Anggaran	Koordinator Tim Aksi Perubahan	1. Membantu membuat draft kerja sama dengan stakeholder. 2. Mengkoordinir hasil pekerjaan masing-masing.

6	Sarie Anggraini S.Sos, M.Si NIP. 19860129 2012 2 002 Penyusun Laporan Keuangan	Anggota	Membantu Tim Aksi Perubahan dalam melaksanakan kegiatan
7	Sumi NIP. 19790224 201212 2 001 Pengadmnistrasi Keuangan	Anggota	Membantu Tim Aksi Perubahan dalam melaksanakan kegiatan
8	Heryadi Puji Hidayat, S. Kom Operator Komputer Perencanaan	Anggota	Membantu Tim Aksi Perubahan dalam melaksanakan kegiatan

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN
OGAN KOMERING ILIR,
MUH IQBAL BASA, SE
Pembina Tingkat I Irb
NIP. 19810416 201001 1 012



daftar hadir dan notulen serta Dokumentasi bersama tim efektif



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR SEKRETARIAT DPRD

Jalan H. Sulaiman Raden Anom Kayuagung
Telepon : (0712) 321390, Faksimile. (0712) 321390
Laman www.setwan.kaboki.web.id, Email setwankaboki@gmail.com

NOTULEN RAPAT

Rapat : Sosialisasi Anggota Tim Efektif Pengembangan Sistem
Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Program di
Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir
Hari/Tanggal : Kamis, 23 Oktober 2025
Waktu : 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Banggar
Pimpinan Rapat : Kabag Keuangan Program dan Anggaran
Peserta Rapat : Tim Efektif Perencanaan Sekretariat DPRD Kab. OKI

Hasil Rapat sebagai berikut:

1. Penetapan fokus inovasi, yakni pengembangan sistem monitoring dan evaluasi (Monev) sederhana berbasis digital untuk meningkatkan keterpaduan data dan transparansi kinerja di Sekretariat DPRD Kabupaten OKI.
2. Pembagian peran dan tugas, mencakup penyusunan instrumen Monev digital, pengumpulan data kegiatan, pengolahan laporan, serta penyediaan dukungan teknis bagi tiap bagian.
3. Penyusunan alur kerja Monev, mulai dari input data oleh masing-masing bagian, verifikasi oleh koordinator, hingga penyajian laporan melalui dashboard.
4. Penetapan jadwal pelaksanaan, termasuk timeline uji coba sistem, pendampingan pengguna, serta evaluasi berkala.
5. Identifikasi kebutuhan pendukung, seperti pelatihan singkat pengoperasian Google Form, Google Sheet, dan Dashboard.
6. Komitmen bersama, yaitu memastikan seluruh bagian berpartisipasi aktif dalam penggunaan sistem dan menyampaikan data secara tepat waktu.

Demikianlah Notulen rapat ini dibuat.

Notulen,

Surmi

Surmi
NIP. 19790224 201212 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR SEKRETARIAT DPRD

Jalan H. Sulaiman Raden Anom Kayuagung
Telepon : (0712) 321390, Faksimile. (0712) 321390
Laman www.setwan.kaboki.web.id, Email setwankaboki@gmail.com

DAFTAR HADIR RAPAT

Rapat : Sosialisasi Anggota Tim Efektif Pengembangan Sistem
Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Program di
Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir
Hari/Tanggal : Kamis, 23 Oktober 2025
Waktu : 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Banggar

No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Julio Bambang	Katancang	<i>Julio</i>
2	Yenny Hendarini	Kecamatan Kay	<i>Yenny</i>
3	SARIE	Staf	<i>SARIE</i>
4	Surmi	Staf	<i>Surmi</i>
5	Heriyadi	Staf	<i>Heriyadi</i>



SEKRETARIS DPRD KABUPATEN
OGAN KOMERING ILIR,

MUH IQBAL BASA, SE
Pembina Tingkat I/ I/b
NIP. 19810416 201001 1 012



BAB IV

KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN

Keberlanjutan aksi perubahan merupakan indikator keberhasilan utama dari setiap proyek inovasi dalam Diklat Kepemimpinan. Aksi perubahan yang hanya selesai pada tahap implementasi awal tanpa memiliki arah keberlanjutan tidak akan memberikan manfaat jangka panjang bagi organisasi. Karena itu, keberlanjutan harus dirancang sejak tahap awal, diintegrasikan dalam setiap langkah implementasi, dan mendapat dukungan penuh dari seluruh stakeholder organisasi.

Pada aksi perubahan “**Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Program di Sekretariat DPRD Kabupaten OKI**”, keberlanjutan menjadi bagian penting karena sistem ini diharapkan menjadi *instrumen resmi* dalam proses perencanaan dan evaluasi kinerja program. Sistem Monev bukan sekadar alat bantu administrasi, tetapi merupakan fondasi tata kelola perencanaan modern yang berbasis data, terstruktur, dan mudah diakses.

a. Penguatan Regulasi Internal

Regulasi merupakan pilar utama keberlanjutan. Tanpa regulasi, penggunaan sistem akan bersifat sementara dan bergantung pada komitmen individu. Oleh sebab itu:

- Disusun **Surat Keputusan Sekretaris DPRD** mengenai penerapan Sistem Monev sebagai alat wajib dalam proses perencanaan.
- Regulasi mengatur **tanggung jawab pengisian, jadwal pelaporan, standar data, serta mekanisme evaluasi**.
- Regulasi juga mengatur penunjukan **operator sistem** dan **tim pemeliharaan** agar tidak terjadi kekosongan tanggung jawab ketika terjadi rotasi pegawai.

Dengan adanya dasar hukum internal, keberlanjutan sistem lebih terjamin dan tidak mudah terhenti meski terjadi perubahan struktur organisasi.

b. Penguatan Kelembagaan dan Institutional Branding

Sistem Monev perlu memiliki identitas yang kuat agar menjadi bagian dari budaya kerja organisasi. Untuk itu dilakukan:

- Pemberian nama dan identitas visual sistem,



- Sosialisasi resmi kepada seluruh pegawai Sekretariat DPRD,
- Penempatan sistem ini dalam dokumen-dokumen resmi seperti laporan triwulanan atau dokumen perencanaan internal.

Dengan demikian, sistem tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi menjadi bagian dari jati diri organisasi.

c. Penguatan Kapasitas SDM Secara Berkelanjutan

Sumber daya manusia adalah faktor penentu keberlanjutan inovasi. Sistem digital hanya dapat berjalan jika SDM memahami cara mengoperasikan dan memeliharanya. Langkah yang dilakukan meliputi:

- Mengadakan **pelatihan internal** bagi seluruh bagian terutama yang terlibat dalam perencanaan, pelaporan, dan evaluasi.
- Penyusunan **panduan penggunaan** dalam bentuk SOP dan buku petunjuk singkat.
- Penetapan minimal **dua operator inti** dan **satu operator cadangan**, sehingga sistem tidak terhenti ketika salah satu pegawai pindah atau berhalangan.
- Mendorong budaya kerja berbasis data sehingga pegawai terbiasa menggunakan sistem sebagai alat utama.

Dengan SDM yang kompeten, keberlanjutan sistem dapat terjaga walaupun terjadi perubahan personel.

d. Integrasi dengan Sistem Informasi Perencanaan Daerah

Untuk meningkatkan efektivitas dan relevansi, sistem Monev DPRD diarahkan untuk terintegrasi secara bertahap dengan sistem informasi perencanaan yang dikelola Bappeda OKI. Integrasi ini sangat strategis karena:

- Mempermudah sinkronisasi indikator program antar instansi,
- Mempercepat proses evaluasi tahunan,
- Menyediakan satu sumber data yang akurat dan konsisten.

Integrasi bertahap dilakukan melalui koordinasi rutin dengan Bappeda serta penyelarasan format data dan indikator kinerja.



3. Rencana Tindak Lanjut Setelah Implementasi

Setelah sistem mulai dioperasikan, beberapa langkah tindak lanjut dilakukan untuk memastikan sistem berjalan optimal.

a. Evaluasi Teknis dan Pengguna

Dalam tiga bulan pertama, dilakukan evaluasi teknis terhadap:

- Fitur yang berjalan dan yang belum optimal,
- Tingkat pemahaman dan kenyamanan pengguna,
- Kesesuaian data yang diunggah dengan kebutuhan evaluasi.

Evaluasi dilakukan melalui wawancara, uji coba fitur, dan observasi penggunaan sehari-hari.

b. Peningkatan dan Penyempurnaan Sistem

Berdasarkan hasil evaluasi, dilakukan upaya peningkatan sistem melalui:

- Penambahan menu laporan otomatis,
- Pengembangan tampilan grafik capaian program,
- Penguatan keamanan sistem dan backup data reguler,
- Penyempurnaan SOP pengelolaan sistem.

Penyempurnaan ini dilakukan secara bertahap agar sistem semakin matang dan sesuai kebutuhan.

c. Implementasi Penuh dan Pengalihan Dokumen Manual

Setelah sistem stabil, seluruh proses monitoring dan evaluasi akan dialihkan secara penuh ke sistem digital. Dokumen manual hanya digunakan sebagai arsip. Dengan demikian:

- Efisiensi kerja meningkat,
- Duplikasi data berkurang,
- Laporan menjadi lebih cepat dan akurat.



d. Monitoring Disiplin Pengguna

Untuk menjaga keberlanjutan penggunaan, dilakukan pengawasan secara berkala terhadap kedisiplinan pengguna melalui:

- Pemeriksaan update data mingguan,
- Laporan bulanan kepada Sekretaris DPRD,
- Rekap kepatuhan pengguna sebagai bahan evaluasi kinerja.

Mekanisme ini mampu meningkatkan budaya penggunaan sistem dalam jangka panjang.

4. Dukungan Kelembagaan dalam Keberlanjutan

Aksi perubahan ini mendapat dukungan yang kuat dari tiga stakeholder utama:

a. Sekretaris DPRD Kabupaten OKI

- Menjamin pelaksanaan regulasi,
- Mendorong penggunaan sistem dalam seluruh kegiatan,
- Menyediakan anggaran pemeliharaan,
- Mengawasi implementasi dan kepatuhan pengguna.

Dukungan Sekretaris DPRD merupakan fondasi penting keberlanjutan sistem.

b. Bappeda Kabupaten OKI

- Memberikan masukan teknis dalam penyusunan format indikator kinerja,
- Membuka ruang integrasi data dengan sistem perencanaan daerah,
- Menjadi mitra strategis dalam sinkronisasi program dan evaluasi pembangunan.

c. Inspektorat Kabupaten OKI

- Menggunakan sistem Monev DPRD sebagai dokumen pendukung review kinerja,
- Memberikan catatan perbaikan terkait pengendalian internal,
- Mendukung sistem sebagai referensi audit internal di masa depan.

6. Roadmap Keberlanjutan 1–3 Tahun

Tahun Pertama (2025):

- Pengoperasian penuh sistem Monev,
- Evaluasi berkala dan perbaikan fitur,
- Pelatihan internal bagi pegawai.

Tahun Kedua (2026):

- Integrasi data dengan Bappeda,
- Pemanfaatan sistem sebagai basis penyusunan laporan tahunan,
- Peningkatan kapasitas server dan keamanan data.

Tahun Ketiga (2027):

- Pemantapan sistem sebagai alat evaluasi resmi,
- Pengembangan fitur baru seperti dashboard publik,
- Potensi pengembangan aplikasi mobile.

Keberlanjutan aksi perubahan ini merupakan komitmen bersama antara Sekretariat DPRD OKI, Bappeda, dan Inspektorat. Dengan adanya strategi yang terencana, penguatan SDM, dukungan regulasi, dan roadmap jangka panjang, sistem Monev yang dikembangkan diharapkan tidak hanya membantu proses evaluasi program, tetapi juga menjadi bagian dari transformasi digital tata kelola pemerintahan daerah.

Aksi perubahan ini diharapkan tidak berhenti pada tahap implementasi saja, tetapi terus berkembang dan menjadi fondasi dalam meningkatkan akuntabilitas perencanaan serta kualitas pelayanan publik di Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir.

1. Dukungan Sekretaris DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir

Sebagai mentor sekaligus pimpinan langsung di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten OKI, **Sekretaris DPRD** memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan aksi perubahan yang diinisiasi oleh Yudico Rambang, SE. Sekretaris DPRD menilai bahwa pengembangan sistem monitoring dan evaluasi perencanaan program merupakan kebutuhan mendesak dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan kegiatan, penyusunan anggaran, dan efektivitas pelaporan.

Dalam berbagai kesempatan rapat koordinasi, Sekretaris DPRD menyampaikan bahwa selama ini proses perencanaan masih menghadapi beberapa kendala, seperti ketidakteraturan pengumpulan data, belum adanya format monev yang terintegrasi, serta belum tersedianya media digital yang mampu menampilkan perkembangan program secara real time. Oleh karena itu, beliau menegaskan bahwa aksi perubahan ini bukan hanya relevan, tetapi juga selaras dengan arah pembenahan tata kelola kelembagaan.

Sekretaris DPRD juga memberikan dukungan berupa:

- Penetapan peserta sebagai pelaksana kegiatan aksi perubahan,
- Penyediaan akses data dan dokumen perencanaan,
- Fasilitasi koordinasi lintas bagian,
- Pembentukan Tim Efektif, dan
- Pengawasan implementasi inovasi hingga dapat digunakan oleh seluruh bagian terkait.

Beliau berharap agar sistem yang dikembangkan dapat menjadi instrumen resmi dalam proses evaluasi dan menjadi budaya kerja baru yang mendorong transparansi serta efisiensi kerja di lingkungan Sekretariat DPRD.

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
SEKRETARIAT DPRD
Jalan H. Sulaiman Raden Anom Kayuagung
Telepon : (0712) 321390, Faksimile : (0712) 321390
Laman www.setwan.kaboki.web.id, Email setwankaboki@gmail.com

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Berkenaan dengan pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan IV Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Selatan yang bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN RI) Tahun 2025, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUH IQBAL BASA, SE
NIP : 19810416 201001 1 012
Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I/ IVb
Jabatan : Pjt. Sekretaris DPRD Kabupaten OKI
Instansi : Sekretariat DPRD Kabupaten OKI

Dengan ini menyatakan dukungan terhadap Aksi Perubahan Pengembangan Sistem Monitoring Dan Evaluasi Perencanaan Program Di Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir yang dilaksanakan oleh :

Nama : YUDICO RAMBANG, SE
NIP : 19830331 200903 1 002
Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I/ IVb
Jabatan : Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran
Instansi : Sekretariat DPRD Kabupaten OKI

Aksi Perubahan ini sangat penting untuk melaksanakan Pengembangan Sistem Monitoring Dan Evaluasi Perencanaan Program Di Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Demikian surat pernyataan dukungan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pjt. Sekretaris DPRD
Kabupaten Ogan Komering Ilir,

Muh. Iqbal Basa, SE
Pembina
NIP. 19810416 201001 1 012



2. Dukungan Kepala Bappeda Kabupaten Ogan Komering Ilir

Sebagai instansi pemerintah yang memiliki kewenangan utama dalam perencanaan pembangunan daerah, **Bappeda Kabupaten OKI** memberikan dukungan dan apresiasi terhadap aksi perubahan ini. Kepala Bappeda memandang bahwa inisiatif pengembangan sistem monitoring dan evaluasi di lingkungan Sekretariat DPRD sangat bersinergi dengan sistem perencanaan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Dalam pernyataannya, Kepala Bappeda menekankan bahwa proses perencanaan di DPRD merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari siklus perencanaan daerah. Oleh karena itu, keberadaan sistem Monev di Sekretariat DPRD akan memperkuat keterpaduan informasi, mempermudah sinkronisasi program, dan meningkatkan kualitas rekomendasi DPRD terhadap kebijakan daerah.

Bentuk dukungan Bappeda meliputi:

- Pemberian masukan teknis terkait standar perencanaan daerah,
- Membuka ruang koordinasi dalam penyelarasan indikator kinerja, serta
- Kesiapan mengintegrasikan data apabila di masa depan sistem DPRD dapat terhubung dengan sistem informasi perencanaan daerah yang dikelola Bappeda.

Kepala Bappeda berharap aksi perubahan ini dapat meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas perencanaan di DPRD sehingga lebih konstruktif dalam mendukung pembangunan daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 Jalan Kapten H. Soelaiman Raden Anom No 7 Kelurahan Jus-sua Kayagung
 Telepon : (0712) 321360, Faksimile: (0712) 321360
 Laman: www.bappedakaboki.go.id, Pos-El: okbappeda@gmail.com

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Berkenaan dengan pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan IV Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Selatan yang bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN RI) Tahun 2025, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AIDIL AZWARI, SP, M.Si
 NIP : 19741222 200604 1 001
 Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I/ IVb
 Jabatan : Kepala Bappeda Kabupaten OKI
 Instansi : Bappeda Kabupaten OKI

Dengan ini menyatakan dukungan terhadap Aksi Perubahan Pengembangan Sistem Monitoring Dan Evaluasi Perencanaan Program Di Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir yang dilaksanakan oleh :

Nama : YUDICO RAMBANG, SE
 NIP : 19830331 200903 1 002
 Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I/ IVb
 Jabatan : Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran
 Instansi : Sekretariat DPRD Kabupaten OKI

Aksi Perubahan ini sangat penting untuk melaksanakan Pengembangan Sistem Monitoring Dan Evaluasi Perencanaan Program Di Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Demikian surat pernyataan dukungan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA BAPPEDA KAB. OKI

(Signature)
AIDIL AZWARI, S.P., M.Si
 Pembina Tingkat I / IV.b
 NIP. 19741222 200604 1 001



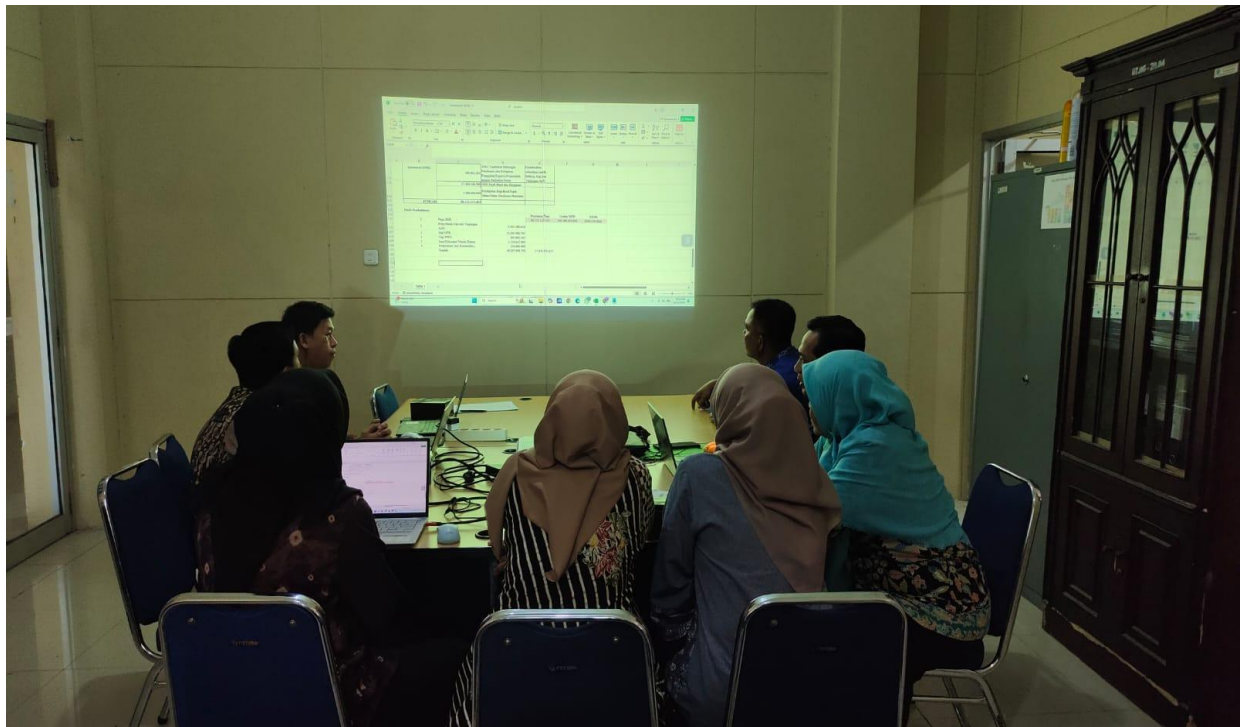
AIDIL AZWARI, S.P., M.Si.
Kepala BAPPEDA Kab OKI

Uji coba sosialisasi dengan stakeholder dalam hal ini Bappeda tentang Sistem Monitoring dan evaluasi Perencanaan Program Sekretariat DPRD Kabupaten OKI

Pada tahap ini dilakukan sosialisasi sistem monitoring dan evaluasi kepada beberapa pegawai Subbag Perencanaan Sekretariat DPRD OKI untuk memastikan mereka memahami tujuan, alur kerja, serta cara pengoperasian sistem. Sosialisasi mencakup penjelasan mengenai mekanisme input data kegiatan, penyimpanan dokumen di Google Drive, serta pemanfaatan dashboard berbasis MS Excel sebagai alat visualisasi progres kinerja.

Setelah sosialisasi, dilakukan uji coba penggunaan sistem secara langsung. Pegawai diminta mengisi data kegiatan ke dalam file Excel yang telah disiapkan dan mengunggahnya ke folder Google Drive yang terstruktur. Pendampingan diberikan selama proses uji coba agar pegawai dapat menyesuaikan diri dengan format baru. Hasil uji coba menunjukkan bahwa pegawai mampu mengikuti alur kerja dengan baik setelah diberikan arahan, meskipun ada beberapa masukan untuk penyederhanaan kolom dan pengaturan folder agar lebih mudah digunakan. Tahap ini memastikan bahwa dasar pengoperasian sistem dapat dipahami dan dilaksanakan oleh pengguna internal.





3. Dukungan Inspektur Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir

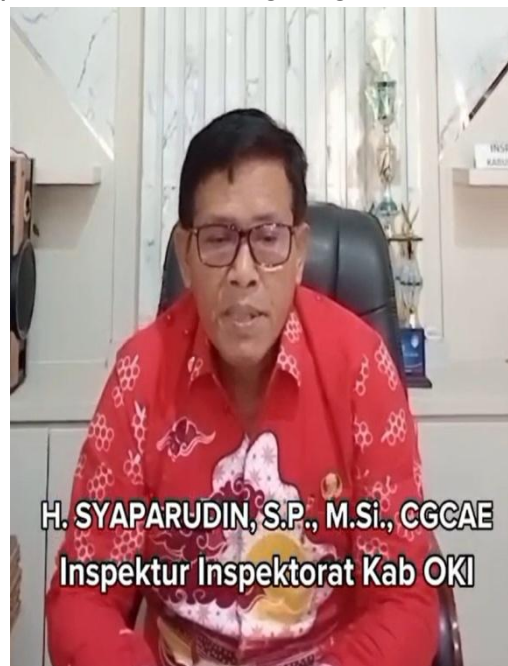
Sebagai lembaga pengawas internal pemerintah daerah, **Inspektorat Kabupaten OKI** memberikan dukungan strategis terhadap aksi perubahan ini. Inspektur Kabupaten OKI menilai bahwa pengembangan sistem monitoring dan evaluasi merupakan langkah konkret dalam memperkuat kontrol internal serta mengurangi risiko ketidaktepatan data dan pelaporan dalam proses perencanaan.

Inspektur menyampaikan bahwa selama ini evaluasi internal sering melibatkan pengecekan manual terhadap dokumen dan data kegiatan. Dengan adanya sistem Monev berbasis digital yang terstruktur, proses pengawasan dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat, dan berbasis bukti. Sistem ini juga dianggap sangat membantu Inspektorat dalam melakukan reviu dan pemantauan berkala terhadap kinerja perencanaan di Sekretariat DPRD.

Dukungan Inspektorat diberikan dalam bentuk:

- Masukan terkait aspek pengendalian intern dan mitigasi risiko,
- Review terhadap rancangan SOP dan alur kerja Monev,
- Dorongan agar inovasi ini dapat dilembagakan melalui kebijakan internal.

Inspektorat optimis bahwa aksi perubahan ini akan meningkatkan tertib administrasi, akurasi data, serta transparansi dalam proses perencanaan di lingkungan DPRD.





BAB V

KETERKAITAN DENGAN MATA PELATIHAN PILIHAN

Dalam setiap organisasi, keberhasilan pelaksanaan tugas sangat ditentukan oleh bagaimana kepemimpinan dijalankan. Hal ini juga berlaku di Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), terutama pada bidang perencanaan yang menjadi jantung dari proses penyusunan program dan kegiatan lembaga. Perencanaan yang baik tidak hanya sebatas menyusun dokumen kerja tahunan, tetapi juga harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, menyesuaikan dengan dinamika kebijakan pemerintah, serta mendukung peran DPRD sebagai lembaga legislatif daerah. Di sinilah kepemimpinan strategis ASN memainkan peran penting, karena tanpa arah kepemimpinan yang jelas, proses perencanaan kerap berjalan seadanya dan kurang menyentuh esensi pembangunan.

Dalam kenyataannya, terdapat berbagai isu aktual yang muncul terkait pelaksanaan perencanaan di lingkungan Sekretariat DPRD. Masih sering ditemukan tumpang tindih program antarbagian, koordinasi yang belum optimal, hingga pemanfaatan data dan teknologi yang belum sepenuhnya dimaksimalkan. Tantangan ini semakin diperberat oleh tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan cepat, sementara kapasitas ASN dalam menghadapi perubahan regulasi dan perkembangan teknologi masih belum merata. Situasi tersebut menciptakan jarak antara apa yang idealnya dirumuskan dalam dokumen perencanaan dengan implementasi nyata yang terjadi di lapangan.

Perbedaan kepentingan, keterbatasan sumber daya manusia, dan minimnya sinergi antarbagian sering menimbulkan konflik kecil maupun besar dalam proses penyusunan rencana kerja. Kondisi ini menggambarkan adanya kesenjangan yang harus segera diatasi melalui hadirnya kepemimpinan strategis. Seorang pemimpin yang strategis tidak hanya mengarahkan, tetapi juga mampu membangun visi bersama, mendorong kolaborasi, serta menumbuhkan semangat inovasi di kalangan ASN.

Oleh karena itu, membahas “Kepemimpinan Strategis ASN dalam Menunjang Fungsi Perencanaan di Sekretariat DPRD Kabupaten OKI” menjadi sangat relevan. Kajian ini penting untuk memahami bagaimana kepemimpinan dapat menjadi motor penggerak yang memperkuat proses perencanaan, menjembatani gap antara kebijakan dan pelaksanaan, serta menciptakan perencanaan yang lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan demi mendukung pembangunan daerah yang lebih berkualitas.



Tabel 5.1. Keterkaitan Aksi Perubahan dengan Materi Pelatihan yang Dipilih.

N o	Judul Proyek/ Aksi Perubahan	Mata Pelatihan	Jalur Pembelajaran	Hubungan dengan Proyek/Aksi Perubahan	Bukti	Sumber Pembelajaran
1	Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Program di Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir.	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Gender Equality, Disability and Social inclusion (GEDSI) (3 JP)	Mandiri	Mata kuliah GEDSI menekankan pentingnya memastikan bahwa setiap program dan kebijakan pemerintah tidak eksklusif, melainkan mampu menjangkau seluruh kelompok masyarakat, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, lansia, anak, serta kelompok rentan lainnya.	Sertifikat Nomor 11594/4012/LAN/68/2025 tanggal 4 September 2025	ASN Berpijar LAN RI
2	Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Program di Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir.	Pelatihan Struktural Kepemimpinan – Keterampilan Digital (Digital Skill) 2JP	Mandiri	Aksi perubahan yang berfokus pada pengembangan sistem monitoring dan evaluasi (Monev) merupakan contoh nyata penerapan kompetensi keterampilan digital dalam mendukung tata kelola pemerintahan modern. Materi Digital Skill dalam Pelatihan Kepemimpinan Pengawas menekankan kemampuan ASN untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam meningkatkan efektivitas kerja, efisiensi layanan publik, dan kualitas pengambilan keputusan. Hal tersebut sangat relevan dan sejalan dengan tujuan utama dari aksi perubahan ini.	Sertifikat Nomor 22468/4012/LAN/64/2025 tertanggal 4 September 2025	ASN Berpijar LAN RI



3	Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Program di Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir.	Pengelolaan Konflik Kepentingan (2JP)	Mandiri secara Online	Pengelolaan konflik kepentingan yang transparan dan akuntabel merupakan dasar utama dalam mengoptimalkan sistem layanan informasi di tingkat kecamatan. Tanpa manajemen yang jelas dan terbuka, sistem tersebut berpotensi disalahgunakan untuk memenuhi kepentingan individu atau kelompok tertentu, sehingga mengabaikan prinsip pelayanan publik yang adil dan efisien	Sertifikat Nomor 13108/4012/LA N/114/2025 tanggal 4 September 2025	ASN Berpijar LAN RI
4	Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Program di Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir.	Resiliensi Diri (Self Resilianty) (2JP)	Mandiri secara Online	Materi Resiliensi Diri dalam Pelatihan Kepemimpinan Pengawas mengajarkan kemampuan seorang ASN untuk tetap tangguh, adaptif, dan mampu bertahan dalam tekanan serta perubahan lingkungan kerja. Resiliensi diri sangat relevan dengan pelaksanaan aksi perubahan yang memerlukan komitmen, ketahanan mental, dan kemampuan mengatasi berbagai hambatan—baik teknis, sosial, maupun birokratis. Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi (Monev) di Sekretariat DPRD OKI bukan hanya inovasi teknis, tetapi juga sebuah proses transformasi yang memerlukan kesiapan emosional, keteguhan sikap, dan ketahanan diri dari pelaksana perubahan.	Sertifikat Nomor :23841/4012/LA N/6 5/2025 Tanggal, 4 September 2025	ASN Berpijar LAN RI



Berikut lampiran Sertifikat Mata Pelatihan yang diikuti Project Leader Selama Mengikuti Proses Pelatihan Kepemimpinan Pengawas sebagai Upaya mendukung penyusunan laporan aksi perubahan

Gambar 5.1

Sertifikat Mata Pelatihan Pilihan yang mendukung Aksi Perubahan







Pelatihan Struktural Kepemimpinan - Keterampilan Digital (Digital Skill) Dalam Penyusunan Kebijakan

No Kompetensi yang dipelajari	
1	Keterampilan Digital (Digital skill) dalam Penyusunan Kebijakan (3 JP)





Pengelolaan Konflik Kepentingan (2 JP)

No Kompetensi yang dipelajari	
1	Pengelolaan Konflik Kepentingan





Pelatihan Struktural Kepemimpinan - Resiliensi Diri (Self Resilience) (2 JP)

No Kompetensi yang dipelajari	
1	Resiliensi Diri (Self Resilience) (3 JP)



Dalam rangka menyelesaikan permasalahan ketidaksesuaian antara program/kegiatan dengan kebutuhan nyata DPRD serta lemahnya sistem monitoring dan evaluasi di Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir, strategi utama yang diambil adalah mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi (Monev) sederhana berbasis digital. Sistem ini dirancang menggunakan platform yang mudah dioperasikan seperti Google Drive, dan Dashboard Excel, yang memungkinkan seluruh bagian di Sekretariat DPRD untuk menginput, memantau, dan mengevaluasi progres kegiatan secara real time.

Terobosan ini bertujuan menciptakan sistem kerja yang efisien, transparan, dan terukur tanpa memerlukan investasi besar dalam infrastruktur teknologi. Pendekatan ini menggabungkan inovasi manajerial dan pemanfaatan teknologi digital sederhana, serta peningkatan kapasitas SDM agar mampu mengelola data dan laporan kinerja secara mandiri. Selain itu, inovasi ini diharapkan menjadi model awal untuk pengembangan sistem Monev yang lebih komprehensif di masa mendatang.

B. Tahapan Kegiatan / Milestone

Tahapan kegiatan pengembangan sistem monitoring dan evaluasi perencanaan program dilaksanakan secara bertahap dalam kurun waktu pelaksanaan aksi perubahan hingga penerapan awal. Rangkaian kegiatan ini dijabarkan dalam tabel berikut:

No	Kegiatan Utama	Waktu Pelaksanaan	Output yang Diharapkan
1	Konsultasi dengan Mentor	13 Oktober 2025	Mendapatkan arahan, masukan, dan validasi awal terhadap rancangan aksi perubahan.
2	Membuat SK Tim Efektif	15 Oktober 2025	Terbitnya Surat Keputusan Tim Efektif pelaksana aksi perubahan.
3	Rapat dengan Tim Efektif	23 Oktober 2025	Penetapan pembagian tugas, tanggung jawab, dan jadwal pelaksanaan kegiatan.
4	Koordinasi dengan <i>Stakeholder</i>	30 Oktober 2025	Dukungan dan komitmen dari stakeholder terkait, termasuk bagian perencanaan,



No	Kegiatan Utama	Waktu Pelaksanaan	Output yang Diharapkan
			keuangan, dan sekretariat alat kelengkapan DPRD.
5	Penyusunan dan Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi	6 November 2025	Tersusunnya format, alur, atau prototipe sistem monitoring dan evaluasi perencanaan program.
6	Sosialisasi, Pelatihan, atau Uji Coba Sistem	10 November 2025	Pegawai memahami cara penggunaan sistem; diperoleh masukan untuk penyempurnaan.
7	Evaluasi Implementasi Aksi Perubahan	18 November 2025	Diperoleh umpan balik melalui wawancara, kuesioner, atau dukungan dari pengguna sistem untuk perbaikan lanjutan.

C. Sumberdaya (Peta dan Pemanfaatan)

Sumber daya yang dimanfaatkan dalam pelaksanaan aksi perubahan ini meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dukungan anggaran, serta pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan sumber daya dilakukan secara efisien dengan mengoptimalkan potensi internal Sekretariat DPRD.

1. Sumber Daya Manusia

- Penanggung jawab: Sekretaris DPRD Kabupaten OKI
- Tim Efektif: 6 orang dari berbagai bagian (Umum, Program & Keuangan, Persidangan, Pengawasan)
- Narasumber Teknis: Mentor dan Coach PKP

2. Sumber Daya Anggaran

- Memanfaatkan anggaran internal kegiatan peningkatan kapasitas aparatur dan dukungan operasional sekretariat.

3. Sarana dan Prasarana

- Perangkat komputer/laptop, jaringan internet, dan akun Google



Workspace.

4. Teknologi Informasi

- Platform: Google Drive, dan Dashboard Excel
- Output digital: laporan otomatis dan visualisasi capaian program.

D. Manajemen Risiko

Dalam pelaksanaan aksi perubahan ini, terdapat sejumlah risiko yang perlu diidentifikasi dan diantisipasi sejak awal. Manajemen risiko menjadi bagian penting agar proses inovasi berjalan lancar dan mencapai hasil yang diharapkan.

Jenis Risiko	Dampak	Strategi Mitigasi
Kurangnya partisipasi pegawai	Menurunnya efektivitas implementasi sistem	Melakukan sosialisasi dan motivasi berkelanjutan
Keterbatasan kemampuan teknis SDM	Kesalahan input data dan hambatan operasional	Pelatihan teknis singkat dan pendampingan mentor
Gangguan jaringan atau perangkat	Tertundanya pelaporan dan input data	Menyiapkan cadangan data offline
Perubahan prioritas kegiatan DPRD	Penundaan jadwal pelaksanaan milestone	Koordinasi ulang dengan pimpinan untuk penyesuaian waktu

E. Identifikasi Stakeholder Internal dan Eksternal

1. Stakeholder Internal

Stakeholder	Peran	Kepentingan
Sekretaris DPRD	Penanggung jawab dan pengambil keputusan	Suksesnya implementasi sistem Monev
Bagian Program dan Keuangan	Pelaksana teknis dan pengelola data program	Ketersediaan data real time
Bagian Umum	Pendukung administrasi dan pelaporan	Kelancaran operasional sekretariat
Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	Penyedia data kegiatan kedewanan	Konsistensi laporan kegiatan



Bagian Penganggaran dan Pengawasan	Koordinator integrasi data pengawasan DPRD	Efektivitas pengawasan DPRD
------------------------------------	--	-----------------------------

2. Stakeholder Eksternal

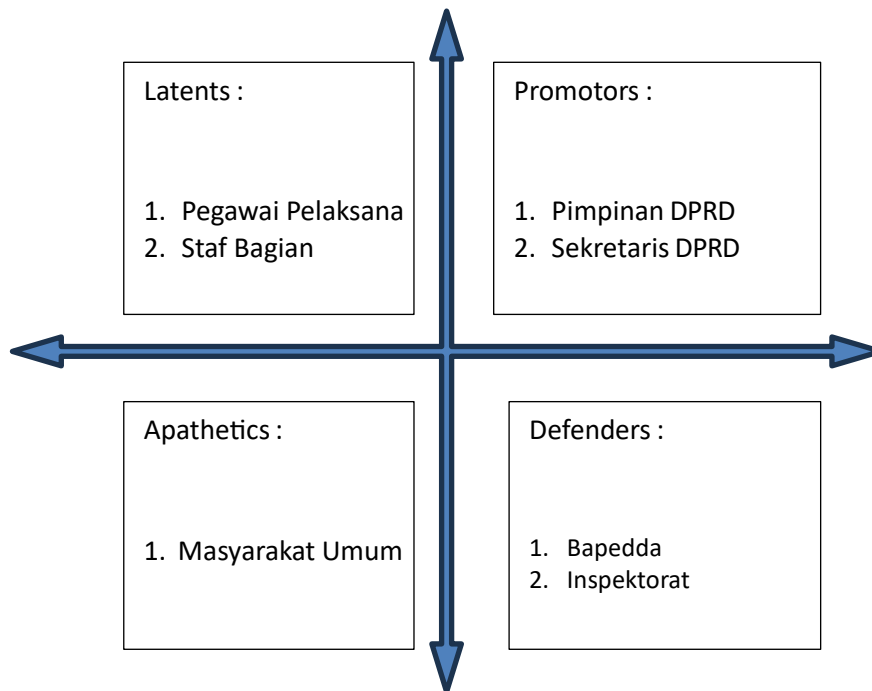
Stakeholder	Peran	Kepentingan
Pimpinan dan Anggota DPRD	Pengguna utama data hasil Monev	Transparansi dan efektivitas kegiatan
Bappeda Kabupaten OKI	Sinkronisasi data perencanaan daerah	Konsistensi perencanaan daerah
Inspektorat Daerah	Pengawasan dan audit internal	Akuntabilitas dan kinerja lembaga
BPKAD Kabupaten OKI	Integrasi dengan data keuangan daerah	Kesesuaian anggaran dan realisasi
BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan	Pembimbing dan penilai aksi perubahan PKP	Replikasi inovasi ke instansi lain

F. Analisis Kuadran Stakeholder

Analisis kuadran stakeholder dilakukan untuk mengelompokkan pihak-pihak yang terlibat berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruhnya terhadap keberhasilan aksi perubahan. Matriks berikut menjelaskan posisi masing-masing stakeholder.

Kuadran	Stakeholder	Strategi Pendekatan
Tinggi Pengaruh - Tinggi Kepentingan	Sekretaris DPRD, Pimpinan DPRD	Libatkan secara aktif dalam setiap tahap; konsultasi dan pelaporan rutin
Tinggi Pengaruh - Rendah Kepentingan	Bappeda, Inspektorat	Bangun kemitraan strategis dan komunikasi periodik
Rendah Pengaruh - Tinggi Kepentingan	Pegawai pelaksana, staf bagian	Berikan pelatihan dan motivasi berkelanjutan
Rendah Pengaruh - Rendah Kepentingan	Masyarakat umum	Sosialisasi hasil akhir sebagai bentuk transparansi publik

Gambar 4.1
Kuadran Steakholders



G. Analisis Sebelum dan Sesudah Perubahan Sistem Monitoring dan Evaluasi

Sebelum pelaksanaan aksi perubahan, proses monitoring dan evaluasi di Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir masih dilakukan secara manual. Setiap bagian menyusun laporan kegiatan secara terpisah menggunakan dokumen Word atau Excel tanpa format baku, sehingga sering terjadi keterlambatan laporan, ketidaksinkronan data, dan kesulitan dalam analisis capaian program. Setelah penerapan sistem Monitoring dan Evaluasi (Monev) Digital Sederhana, seluruh proses pencatatan, pemantauan, dan pelaporan dilakukan secara daring menggunakan Google Drive, dan Dashboard Excel. Perubahan ini meningkatkan efisiensi kerja, akurasi data, serta mempercepat proses pengambilan keputusan oleh pimpinan DPRD.

No	Aspek	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Perubahan (%)	Keterangan
1	Kecepatan Penyusunan Laporan	10–14 hari	2–3 hari	+75%	Otomatisasi laporan mempercepat rekap
2	Akurasi Data	Kesalahan $\pm 25\text{--}30\%$	Kesalahan $\pm 5\text{--}10\%$	+70%	Validasi otomatis
3	Keterlambatan Laporan	5–7 hari	H+1	+85%	Akses cloud langsung
4	Integrasi Data	Terpisah antarbagian	Terhubung dalam satu sistem	+90%	Kolaborasi meningkat
5	Analisis Real-Time	Tidak tersedia	Tersedia otomatis	+100%	Dashboard aktif
6	Kepuasan Pimpinan	60% puas	90% puas	+50%	Laporan lebih cepat dan akurat
7	Partisipasi Pegawai	40% aktif	85% aktif	+45%	Sistem mudah diakses
8	Penggunaan Kertas	150 lembar/bulan	30 lembar/bulan	-80%	Paperless office

Dari hasil analisis di atas terlihat bahwa penerapan sistem Monev digital sederhana telah meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kecepatan proses pelaporan serta memperkuat integrasi antarbagian di Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Sebelum Perubahan

Sebelum diterapkannya Sistem Monitoring dan Evaluasi (Monev) Perencanaan dan Program yang terdigitalisasi, proses pengelolaan data perencanaan di Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir masih dilakukan secara **manual** dan tersebar di berbagai media. Dokumen-dokumen penting seperti TOR/RAB, usulan program, laporan kegiatan, hingga dokumen pendukung lainnya masih tersimpan dalam bentuk hardcopy atau file yang tersimpan secara tidak terstruktur di komputer masing-masing pegawai.

Kondisi ini menimbulkan berbagai kendala, seperti:

- Sulitnya akses data ketika dibutuhkan secara cepat, terutama saat rapat internal, pembahasan program, maupun pada saat penyusunan laporan.
- Risiko kehilangan atau kerusakan dokumen akibat penyimpanan fisik yang tidak terintegrasi.
- Duplikasi data yang kerap terjadi karena tidak adanya satu pintu penyimpanan dokumen.
- Kendala koordinasi antar bagian, karena informasi perencanaan tidak dapat diakses secara real-time dan harus meminta secara manual kepada pemegang dokumen.
- Tidak adanya mekanisme monitoring yang konsisten, sehingga progres penyusunan atau pelaksanaan program tidak terekam dengan baik.



Sesudah Perubahan

Setelah dikembangkan dan diterapkan Sistem Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Program berbasis digital melalui Google Drive sebagai pusat penyimpanan data, terjadi perubahan signifikan dalam tata kelola perencanaan di Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir. Seluruh dokumen perencanaan kini tersimpan dalam satu sistem penyimpanan digital yang terstruktur berdasarkan folder seperti:

Dengan sistem ini, diperoleh berbagai peningkatan, antara lain:

- **Akses data lebih cepat, mudah, dan real-time**, kapan pun dibutuhkan oleh pimpinan maupun staf.
- **Dokumen lebih aman** karena tersimpan di cloud, sehingga mengurangi risiko kehilangan data.
- **Alur kerja lebih efisien**, karena setiap bagian dapat mengunggah, memperbarui, dan memantau dokumen secara langsung.
- **Monitoring lebih terstruktur**, karena progres program dapat dipantau melalui folder kontrol, link formulir monev, maupun format laporan yang distandarkan.
- **Transparansi meningkat**, karena setiap perubahan dapat dilacak melalui fitur riwayat (version history).
- **Kolaborasi lebih baik**, sebab beberapa pegawai dapat bekerja pada dokumen yang sama secara bersamaan.

Transformasi ini tidak hanya meningkatkan efektivitas pengelolaan perencanaan, tetapi juga mendorong budaya kerja yang lebih modern, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan organisasi. Digitalisasi menjadi fondasi penting dalam mendukung tugas Sekretariat DPRD OKI dalam menyiapkan perencanaan program yang lebih berkualitas dan tepat sasaran.



Screenshot ini memperlihatkan struktur folder yang tertata rapi, sehingga memudahkan akses dan pencarian dokumen. Setiap folder berisi dokumen yang telah distandarkan, diunggah, dan diperbarui secara berkala, sehingga proses pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan secara real-time.(data dari 2022 sampai 2025)

MONITORING EVALUASI MANDIRI PERENCANAAN DAN PROGRAM TAHUN 2022										
PERANGKAT DAERAH: SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN OKI										
No.1.1. KEBERADAAN PERENCANAAN KINERJA										
No	Langkah Kerja Evaluasi	Pengujian Atas Kebijakan Dalam Perencanaan Kinerja				Evaluasi Triwulan		KETERANGAN		DOKUMEN ARSIP PENDUKUNG (LINK)
	A. Uraian	Dokumen Pendukung	Hasil Monitoring		NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI		
			Ada	Tidak Ada						
1	Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja	1. Surat Edaran Evaluasi Renja secara Triwulan Tahun 2022 2. Form E.81 dari Permendagri 86/2017	Ada	-	100	AA	100	Lengkap, Terlaksana baik	https://drive.google.com/drive/folder/s/1rOZLDWvRafqKC_ZCeovU49DVn2JkBAE?usp=drive_link	
2	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang	1. Cascading 2022-2023 2. Pohon Kinerja 2022 3. IKU	Ada	-	100	AA	100	Lengkap, Terlaksana dengan baik	https://drive.google.com/file/d/1oxs_SugRH1Xn3JpKfIx_xuUDubdSGKpN5/view?usp=drive_link	
3	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah	1. Renstra Perangkat daerah 2. Renja 2022 3. Perjanjian Kinerja 2022 4. Rencana Aksi 2022	Ada	-	100	AA	100	Lengkap, Terlaksana dengan baik	https://drive.google.com/file/d/1eiuC_rNPBMwSxeDfqaJOYxIMWvFp9TnN/view?usp=drive_link	
4	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek	1. Renja Tahun 2022 2. Rencana Aksi 2022 3. Perjanjian Kinerja 2022	Ada	-	100	AA	100	Lengkap, Terlaksana dengan baik	https://drive.google.com/drive/folder/s/1ZPgTgK1ye-uf_RISw3qQOKOyslaHd8Jg?usp=drive_link	
5	Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja	1. Rencana Aksi 2022 2. Kerangka Acuan Kerja Level Kegiatan Tahun 2023	Ada	-	100	AA	100	Lengkap, Terlaksana dengan baik	https://drive.google.com/file/d/11f1K_KqB1HbBlahOWuHZP4Gdow1RZ1RgC/view?usp=drive_link	
6	Terdapat dokumen Perencanaan Anggaran yang mendukung kinerja	1. RKA 2022 2. DPA 2022	Ada	-	100	AA	100	Lengkap, Terlaksana dengan baik	https://drive.google.com/drive/folder/s/1W1QuHowdztaU5uMQOc6y0_BNgAJd0-P?usp=drive_link	
Mengetahui, Sekretaris DPRD Kabupaten OKI,			Kayuagung, Desember 2025							
			Evaluator Perencanaan							
			Yudico Rambang, SE							
			NIP. 19830331 200903 1 002							
Muh. Iqbal Basa, SE			(.....)							
NIP. 19810416 201001 1 012										

MONITORING EVALUASI MANDIRI PERENCANAAN DAN PROGRAM TAHUN 2023										
PERANGKAT DAERAH: SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN OKI										
No.1.1. KEBERADAAN PERENCANAAN KINERJA										
No	Langkah Kerja Evaluasi	Pengujian Atas Kebijakan Dalam Perencanaan Kinerja				Evaluasi Triwulan		KETERANGAN		DOKUMEN ARSIP PENDUKUNG (LINK)
	A. Uraian	Dokumen Pendukung	Hasil Monitoring		NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI		
1	Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja	1 Form E.81 dari Permendagri 86/2017 2. LKJIP 2023	Ada	Tidak Ada	100	AA	100	Lengkap, Terlaksana baik	https://drive.google.com/drive/folder/s/1rOZLDWvRafqKC_ZCeovU49D_Vn2JkBAE?usp=drive_link	
2	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang	1. Cascading 2023-2024 2. Pohon Kinerja 2023 3. Crosscutting	Ada	-	100	AA	100	Lengkap, Terlaksana dengan baik	https://drive.google.com/file/d/1oxs_SugRH1Xn3JpKfIx_xuUDubdSGKpN5/view?usp=drive_link	
3	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah	1. Renstra Perangkat daerah 2. Renja 2023 3. Perjanjian Kinerja 2023 4. Rencana Aksi 2023	Ada	-	100	AA	100	Lengkap, Terlaksana dengan baik	https://drive.google.com/file/d/1eiuCrNPBMwSXeD0fqJOYxIMWvFp9TnN/view?usp=drive_link	
4	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek	1. Renja Tahun 2023 2. Rencana Aksi 2023 3. Perjanjian Kinerja 2023	Ada	-	100	AA	100	Lengkap, Terlaksana dengan baik	https://drive.google.com/drive/folder/s/1ZPgTgK1ye-uf_RISw3qQOKOyslaHd8Jg?usp=drive_link	
5	Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja	1. Rencana Aksi 2023 2. Kerangka Acuan Kerja Level Kegiatan Tahun 2023	Ada	-	100	AA	100	Lengkap, Terlaksana dengan baik	https://drive.google.com/file/d/11f1KKqB1HbBlahOWuHZP4Gdow1RZ1RgC/view?usp=drive_link	
6	Terdapat dokumen Perencanaan Anggaran yang mendukung kinerja	1. RKA 2023 2. DPA 2023	Ada	-	100	AA	100	Lengkap, Terlaksana dengan baik	https://drive.google.com/drive/folder/s/1W1QuHowdztaU5uMQOc6y0_BNqAjd0-P?usp=drive_link	
Mengetahui, Sekretaris DPRD Kabupaten OKI,			Kayuagung, Desember 2025							
			Evaluator Perencanaan							
			Yudico Rambang, SE							
			NIP. 19830331 200903 1 002							
Muh. Iqbal Basa, SE			(.....)							
NIP. 19810416 201001 1 012										



MONITORING EVALUASI MANDIRI PERENCANAAN DAN PROGRAM TAHUN 2024
PERANGKAT DAERAH: SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN OKI

No.1.1. KEBERADAAN PERENCANAAN KINERJA

No. 17. REKORDAN PENYERAHAN PERENCANAAN KINERJA										
No	Langkah Kerja Evaluasi	Penguji Atas Kebijakan Dalam Perencanaan Kinerja			Evaluasi Triwulan		KETERANGAN		DOKUMEN ARSIIP PENDUKUNG (LINK)	
	A. Uraian	Dokumen Pendukung	Hasil Monitoring		NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI		
			Ada	Tidak Ada						
1	Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja	1. SK Sekda Ttg Pedoman Teknis Pengukuran Kinerja dan pengumpulan Data Kinerja (Bappeda) 2. Perbup Satu Data Indonesia (Kominfo)	Ada	-	100	AA	100	Lengkap, Terlaksana baik	https://drive.google.com/file/d/1UOK0f0sIF979GFAU4XG-g24nhHzle4/view?usp=drive_link	
2	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang	1. Cascading 2024-2025 2. Pohon Kinerja 2024 3. Crosscutting	Ada	-	100	AA	100	Lengkap, Terlaksana dengan baik	https://drive.google.com/file/d/1oxSugRH1Xn3JpKfx_xuUDubdSGKpN5/view?usp=drive_link	
3	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah	1. Renstra Perangkat daerah 2. Renja 2024 3. Perjanjian Kinerja 2024 4. Rencana Aksi 2024	Ada	-	100	AA	100	Lengkap, Terlaksana dengan baik	https://drive.google.com/file/d/1eiuQNPBMwSXeD0fajJOYxIMWefPv9TnN/view?usp=drive_link	
4	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek	1. Renja Tahun 2024 2. Rencana Aksi 2024 3. Perjanjian Kinerja 2024	Ada	-	100	AA	100	Lengkap, Terlaksana dengan baik	https://drive.google.com/drive/folder/s/1ZPqTgK1ye-uf_RISw3gOKOyslaLhD8Jg7usp=drive_link	
5	Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja	1. Rencana Aksi 2024 2. Kerangka Acuan Kerja Level Kegiatan Tahun 2024	Ada	-	100	AA	100	Lengkap, Terlaksana dengan baik	https://drive.google.com/file/d/11f1KkQB1HbBlahCWuH2P4Gdow1RZiRgC/view?usp=drive_link	
6	Terdapat dokumen Perencanaan Anggaran yang mendukung kinerja	1. RKA 2024 2 DPA 2024	Ada	-	100	AA	100	Lengkap, Terlaksana dengan baik	https://drive.google.com/drive/folder/s/1WLQuHowdztaU5uMQOoC6y0BNgAjd0-P7usp=drive_link	
Mengetahui, Sekretaris DPRD Kabupaten OKI,			Kayuagung, Desember 2025							
			Evaluator Perencanaan							
			Yudico Rambang, SE							
			NIP. 19830331 200903 1 002							
Muh. Iqbal Basa, SE			(.....)							
NIP. 19810416 201001 1 012										

MONITORING EVALUASI MANDIRI PERENCANAAN DAN PROGRAM TAHUN 2025
PERANGKAT DAERAH: SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN OKI

No.1.1. KEBERADAAN PERENCANAAN KINERJA

No. 1.1. REKORD KEBERHASILAN PERENCANAAN KINERJA										
No	Langkah Kerja Evaluasi	Penguji Atas Kebijakan Dalam Perencanaan Kinerja			Evaluasi Triwulan		KETERANGAN		DOKUMEN ARSIIP PENDUKUNG (LINK)	
	A. Uraian	Dokumen Pendukung	Hasil Monitoring		NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI		
1	Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja	Perbup/SK tentang Pedoman Teknis Penjenjangan Kinerja (sesuai dengan Permenpanrb nomor 89 tahun 2021)	Ada	Tidak Ada	100	AA	100	Lengkap, Terlaksana baik	https://drive.google.com/drive/folder/s/1qpN8ksQuIY9jpBx-laofnuY2mCW07dqN7usp=drive_link	
2	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang	1. Perda/Perbup yang terkait urusan sektoral PD (RPD)	Ada	-	100	AA	100	Lengkap, Terlaksana dengan baik	https://drive.google.com/file/d/1oxSugRH1Xn3JpKfx_xuUDubdSGKpN5/view?usp=drive_link	
3	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah	Renstra OPD 2025-2026	Ada	-	100	AA	100	Lengkap, Terlaksana dengan baik	https://drive.google.com/file/d/1eiuQNPBMwSXeD0fajJOYxIMWefPv9TnN/view?usp=drive_link	
4	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek	1. Renja Tahun 2025 2. Rencana Aksi 2025 3. Perjanjian Kinerja 2025	Ada	-	100	AA	100	Lengkap, Terlaksana dengan baik	https://drive.google.com/drive/folder/s/1ZPqTgK1ye-uf_RISw3gOKOyslaLhD8Jg7usp=drive_link	
5	Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja	1. Rencana Aksi 2025 2. Kerangka Acuan Kerja Level Kegiatan Tahun 2025	Ada	-	100	AA	100	Lengkap, Terlaksana dengan baik	https://drive.google.com/file/d/11f1KkQB1HbBlahCWuH2P4Gdow1RZiRgC/view?usp=drive_link	
6	Terdapat dokumen Perencanaan Anggaran yang mendukung kinerja	1. RKA 2025 2. DPA 2025	Ada	-	100	AA	100	Lengkap, Terlaksana dengan baik	https://drive.google.com/drive/folder/s/1WLQuHowdztaU5uMQOoC6y0BNgAjd0-P7usp=drive_link	
Mengetahui, Sekretaris DPRD Kabupaten OKI,					Kayuagung, Desember 2025					
					Evaluator Perencanaan					
					Yudico Rambang, SE					
					NIP. 19830331 200903 1 002					
					(.....)					
Muh. Iqbal Basa, SE										
NIP. 19810416 201001 1 012										



Drive

Search in Drive

Shared with me > Tambahkan Dokumen SPI...

Type People Modified Source

Name ↑ Sort Z to A

Name	Owner	Date modified	File size
3.2.1. Kebijakan Manajemen ASN	spipkaboki20...	Oct 10	—
3.3.1. Kebijakan Sistem Informasi	spipkaboki20...	Oct 10	—
3.4.1. Kebijakan Pengelolaan Aset	spipkaboki20...	Oct 10	—
3.5.1. Kebijakan Penyusunan SAKIP atau LKJIP	spipkaboki20...	Oct 10	—
3.6.1. SK Bendahara dan SK Pengurus Barang	spipkaboki20...	Oct 10	—
3.7.1. Kebijakan Pengelolaan BMN, Kebijakan Tata Naskah Dinas	spipkaboki20...	Oct 10	—
3.8.1. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah, Kebijakan BMD	spipkaboki20...	Oct 10	—
3.9.1. Kebijakan SPBE, Kebijakan Pengelolaan Keuangan	spipkaboki20...	Oct 10	—
3.10.1. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah	spipkaboki20...	Oct 10	—

1.25 GB of 15 GB used

Get more storage

Drive

Search in Drive

Shared wit... > KK 3.1 (Asesor ... > Sekretariat Dewan

Type People Modified Source

Name ↑ Owner

1.Lingkungan Pengendalian	heryadipuji@...
2.Penilaian Risiko	heryadipuji@...
3.Kegiatan Pengendalian	heryadipuji@...
4.Informasi dan Komunikasi	heryadipuji@...
5.Pemantauan Pengendalian Intern	heryadipuji@...
1.1.2.RPD 2025-2026.pdf	me
KK Penilaian Mandiri Maturi Peny SPIP SETWAN 2025 FIX...	me
Perbup No. 2 Tahun 2024 ttg RPD Kab. OKI 2025-2026.pdf	me

1.25 GB of 15 GB used

Get more storage

BAB VI

KESIMPULAN

Implementasi rancangan aksi perubahan **“Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi (Monev) Perencanaan Program”** di Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas tata kelola perencanaan serta pelaporan kegiatan. Melalui penerapan **sistem Monev digital sederhana** berbasis *Google Drive*, dan *Dashboard Excel*, proses pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data kinerja menjadi lebih cepat, akurat, dan mudah diakses.

Perubahan dari sistem manual menuju sistem digital memberikan dampak nyata, antara lain:

1. **Efisiensi waktu pelaporan meningkat hingga 75–85%**, sehingga laporan kegiatan dapat tersusun dalam hitungan hari.
2. **Akurasi dan integrasi data antarbagian meningkat hingga 90%**, meminimalkan kesalahan input dan redundansi informasi.
3. **Kepuasan pimpinan DPRD terhadap laporan kinerja naik menjadi 90%**, berkat penyajian data yang lebih tepat waktu dan transparan.
4. **Budaya kerja berbasis data (data-driven)** mulai terbentuk di lingkungan Sekretariat DPRD.
5. **Efisiensi biaya dan sumber daya tercapai**, antara lain melalui penghematan penggunaan kertas hingga 80%.

Penerapan sistem ini juga memperkuat **sinergi antarbagian** (Program, Keuangan, Persidangan, dan Pengawasan) serta meningkatkan **keterlibatan pegawai** dalam proses pelaporan dan evaluasi. Risiko yang mungkin muncul, seperti rendahnya partisipasi pegawai atau gangguan teknis, telah diantisipasi melalui pelatihan, sosialisasi, dan penyusunan prosedur operasional standar (SOP).

Secara keseluruhan, implementasi aksi perubahan ini membuktikan bahwa inovasi sederhana namun tepat guna dapat memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas tata kelola lembaga. Sistem Monev digital menjadi fondasi awal bagi pengembangan sistem yang lebih komprehensif ke depan, sekaligus mendukung terwujudnya **Sekretariat DPRD yang adaptif, efisien, dan akuntabel** dalam melayani kebutuhan kelembagaan DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Keberlanjutan Program (Sustainability)

Agar inovasi ini terus memberikan manfaat jangka panjang, beberapa langkah keberlanjutan telah dirumuskan:

1. Pengembangan Lanjutan Sistem Monev
2. Pelatihan Berkala bagi SDM
3. Penetapan SOP Monev sebagai Dokumen Resmi
4. Evaluasi Tahunan Sistem
5. Dukungan Anggaran Berkelanjutan

Evaluasi terhadap implementasi aksi perubahan yaitu penggunaan *Google Drive* dan *Ms Excel* dalam sistem monitoring dan Evaluasi Perencanaan Program dilakukan lewat Kuisisioner *Google Form* yang disebar di grup *whatsapp* Sub Bagian Perencanaan Sekretariat DPRD Kabupaten OKI. Adapun kuisisionernya di bawah ini :

Section 1 of 4

Kuesioner Pemanfaatan Google Drive dan Microsoft Excel dalam Sistem Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Program Sub Bagian Perencanaan Sekretariat DPRD Kabupaten OKI

Formulir ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas, kendala, dan saran terkait penggunaan Google Drive dan Microsoft Excel dalam sistem monitoring dan evaluasi perencanaan program pada Sub Bagian Perencanaan Sekretariat DPRD Kabupaten OKI. Jawaban Anda sangat berharga untuk pengembangan sistem ke depannya. Terima kasih atas partisipasinya.

Nama (opsional)

Short answer text

Jabatan *

Short answer text

Lama Bekerja di bagian perencanaan *

☐ kurang dari setahun

☐ 1-2 tahun

☐ 3-5 tahun

☐ 5-10 tahun

☐ lebih dari 10 tahun

After section 1 Continue to next section

Section 2 of 4

Pemanfaatan Google Drive dalam Sistem Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Program Sub Bagian Perencanaan Sekretariat DPRD Kabupaten OKI

Description (optional)

Seberapa sering Anda memanfaatkan Google Drive dalam pekerjaan perencanaan program? *

☐ Tidak pernah

☐ Jarang

☐ cukup sering

☐ sering

☐ sangat sering

Apakah Google Drive membantu Anda dalam menyimpan dan menemukan dokumen perencanaan? *

☐ Tidak membantu

☐ Cukup Membantu

☐ Membantu

☐ Sangat Membantu

Kendala apa yang Anda temui saat menggunakan Google Drive dalam pekerjaan perencanaan? *

☐ Akses internet tidak stabil

☐ Belum terbiasa menggunakan Google Drive

☐ Struktur folder belum jelas

☐ Kapasitas penyimpanan

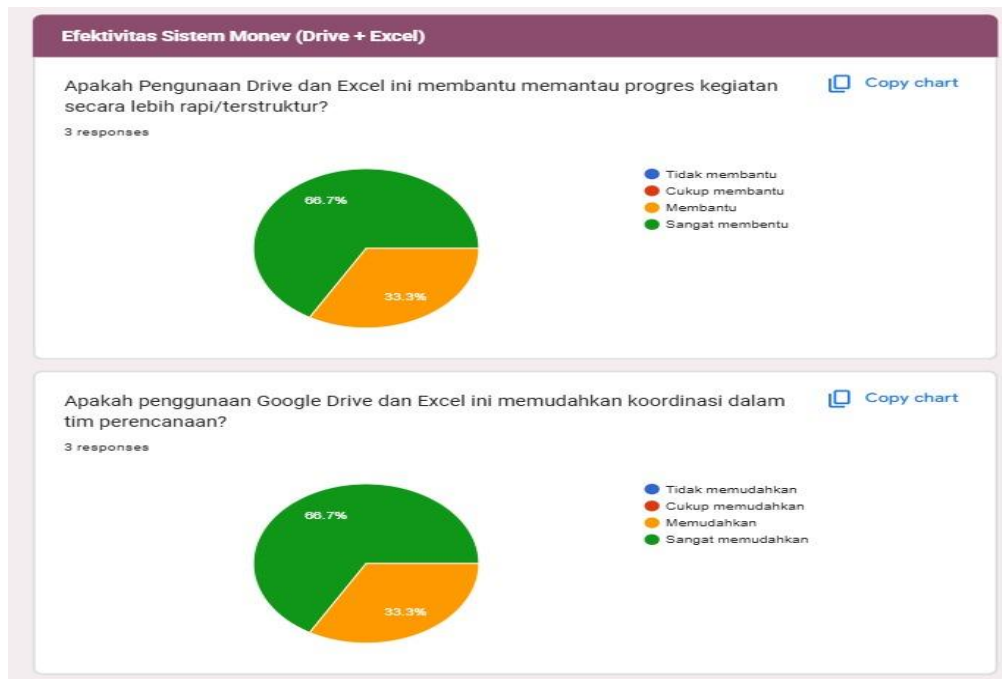
☐ Tidak tahu cara berbagi akses

☐ Other: _____

Hal apa yang menurut Anda paling bermanfaat dari penggunaan Google Drive dalam pekerjaan perencanaan? *

Long answer text

After section 2 Continue to next section



Rekomendasi dan Saran

Sebagai bagian akhir dari pelaksanaan aksi perubahan ini, sejumlah rekomendasi dan saran dirumuskan untuk memastikan keberlanjutan, pengembangan, serta peningkatan efektivitas sistem monitoring dan evaluasi perencanaan program di Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Diperlukan komitmen yang konsisten dari pimpinan serta setiap subbagian agar sistem Monev digunakan secara berkelanjutan. Keberhasilan implementasi sistem sangat ditentukan oleh ketepatan waktu pengisian data serta kedisiplinan dalam melakukan pembaruan informasi.

Fitur sistem perlu terus ditingkatkan, termasuk integrasi data otomatis, visualisasi analitis yang lebih lengkap, serta kemampuan export data yang lebih fleksibel. Pengembangan sistem dilakukan sesuai kebutuhan organisasi dan evaluasi tahunan.

Pelatihan berkala perlu dilaksanakan untuk memperkuat kemampuan pegawai dalam menggunakan sistem Monev, memahami indikator kinerja, serta mengaplikasikan data evaluasi dalam pengambilan keputusan.

Diperlukan peningkatan kualitas jaringan internet, perangkat komputer, dan dukungan teknis lainnya untuk memaksimalkan operasional sistem Monev.

Dalam jangka panjang, sistem Monev dapat diarahkan untuk terhubung dengan sistem perencanaan daerah, sehingga seluruh siklus perencanaan hingga pelaporan menjadi lebih sinkron dan efisien.

Tim internal perlu melakukan evaluasi rutin terhadap efektivitas sistem, tingkat kepatuhan pengisian data, serta tantangan operasional. Hasil evaluasi menjadi dasar untuk perbaikan sistem di tahun berikutnya.

Perlu diterbitkan Surat Keputusan (SK) atau regulasi internal yang menetapkan sistem Monev sebagai instrumen wajib dalam setiap penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan program.

Untuk menghasilkan data Monev yang lebih komprehensif, kolaborasi lintas bagian perlu lebih diperkuat melalui forum koordinasi rutin, penyelarasan indikator, serta penyusunan target kinerja bersama.

Disarankan agar seluruh data hasil monitoring dan evaluasi dijadikan dasar dalam penyusunan RKA dan perencanaan program tahun selanjutnya sehingga perencanaan semakin berbasis bukti (evidence-based planning).

Perlu dilakukan pembaruan SOP secara berkala sesuai perkembangan sistem dan kebutuhan organisasi, agar setiap pegawai memiliki pedoman yang jelas dan terkini dalam menjalankan proses Monev.

Penutup

Secara keseluruhan, pelaksanaan aksi perubahan ini berhasil mencapai tujuan utama yaitu menciptakan sistem monitoring dan evaluasi perencanaan program yang lebih efektif, efisien, dan terintegrasi di Sekretariat DPRD Kabupaten OKI. Inovasi ini tidak hanya bermanfaat bagi peningkatan kinerja internal, tetapi juga menjadi langkah strategis untuk memperkuat akuntabilitas publik dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Dengan adanya sistem Monev ini, diharapkan proses perencanaan program semakin terarah, terukur, dan mampu memberikan dampak positif bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir.